

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN ADVOKAT DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
(Studi di APSI Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

Mega Lailatul Hikmah Amalia

NPM. 1521020041

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ADVOKAT DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT**
(Studi di APSI Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

MEGA LAILATUL HIKMAH AMALIA
NPM. 1521020041

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Pembimbing II : Rohmat, S.Ag., M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

Advokat merupakan penegak hukum serta sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. APSI Kota Bandar Lampung sendiri merupakan wadah para advokat syariah, yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan advokat umum, yaitu salah satunya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, dengan tanpa membedakan agama, ras, budaya, keturunan, dan sosial-ekonomi. Hal itu guna untuk mencapai kebenaran dan keadilan di hadapan hukum.

Dari latar belakang yang penulis jelaskan, rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu bagaimana peran advokat dari APSI Kota Bandar Lampung dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran advokat dari APSI Kota Bandar Lampung. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran advokat dari APSI Kota Bandar Lampung. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap peran Advokat dari APSI Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu membuat *deskriptif*, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengadakan studi pustaka (*library research*) berupa Al-Qur'an, Hadist, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya di analisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa peran advokat dari APSI Kota Bandar Lampung dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat/klien di muka hukum. Menurut fiqh siyasah peran dari advokat APSI Kota Bandar Lampung dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat telah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan membantu masyarakat yang kurang paham akan hukum dan meringankan beban para pencari keadilan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl.Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN
ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM KEPADA MASYARAKAT (Studi di APSI
Lampung)**

Nama : Mega Lailatul Hikmah Amalia

Npm : 1521020041

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II

Rohmat, S.Ag., M.Hl.
NIP. 197409202003121003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

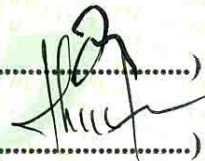
Jl.Letkol. Hendro Suratmin Sukarama Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT (Studi di APSI Kota Bandar Lampung), disusun oleh: MEGA LAILATUL HIKMAH AMALIA, NPM: 1521020041, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syar'iah pada Hari/Tanggal: Rabu/18 September 2019

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Jayusman, M.Ag

(.....)


Sekretaris : Darmayani, S.H.I., M.Sy.

(.....)

Penguji Utama : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H

(.....)


Penguji Pendamping 1 : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H

(.....)

Penguji Pendamping 2 : H. Rohmat, S. Ag.,M.HI.

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**


Dr. H. Khoirudin, M.H.
NIP. 196210211993031002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰٓ أَنْ تَعْدِلُوا
وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُعَرِّضُوا فإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء : ١٣٥)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. an-Nisa : 135)²³

²³Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peneterjemah Penafsiran al-Qur'an, 1971), h. 100.

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

1. Sembah sujudku kepada Allah SWT. dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta Keluarga, Sahabat, dan para pengikutnya.
2. Motivator terbesar dalam hidupku yang kusayangi dan kucintai yaitu kedua orang tuaku Ayahanda Dan Ibunda tercinta Kalimi, S.Pd (alm) dan Siti Fatimatul Muzahro yang telah banyak berjuang dan mendoakan serta selalu memberikan semangat demi tercapainya cita-citaku.
3. Adikku Tersayang Muhammad Bayu Syaifulloh Yang Selalu Mendoakan Dan Memberikan Dorongan Demi Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Saudara-Saudaraku Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2015 Yang Telah Memberikan Semangat Dan Motivasi Dalam Mencapai Keberhasilanku.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Mega Lailatul Hikmah Amalia, dilahirkan di Kota Agung pada tanggal 16 April 1998, anak pertama dari pasangan Kalimi, S.Pd (alm) dan Siti Fatimatul Muzahro. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Mutiara Kasih dan selesai pada tahun 2003, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bulusari selesai tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Gunung Sugih selesai tahun 2012, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun akademik 2015/2016.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Agustus 2019
Yang Membuat

Mega Lailatul Hikmah Amalia

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Signifikasi Penelitian.....	9
G. Metode Penelitian.....	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian teori	14
1. Sejarah dan Definisi Advokat	14
2. Peran dan Fungsi Advokat	21
3. Tugas Advokat	23
4. Advokat dalam Fiqh Siyasah	25
5. Bantuan Hukum dalam Islam	29
B. Tinjauan Pustaka	58

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Kota Bandar Lampung	69
B. Fungsi dan Peran Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Kota Bandar Lampung	73
C. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat APSI Kota Bandar Lampung kepada Masyarakat.....	75
D. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Oleh Advokat APSI Kota Bandar Lampung	84

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Advokat APSI Kota Bandar Lampung dalam	
---	--

Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat	82
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Advokat APSI Kota Bandar Lampung dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	90
B. Rekomendasi	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Contoh Pemberian Bantuan Hukum (Litigasi) 78
2. Tabel 2 Contoh Pemberian Bantuan Hukum (Non Litigasi) 81



DAFTAR BAGAN

1. Bagan 1 Prosedur Perolehan Bantuan Hukum	82
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas perspektif pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul proposal dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul ini adalah "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat (Studi di APSI Kota Bandar Lampung)". Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari, dsb).²⁴

2. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat dan negara dengan segala segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁵

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 1470.

²⁵J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raia Grafindo, 1997), h. 26.

3. Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemain, proses, cara dan perbuatan memerankan.²⁶

4. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.²⁷

5. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.²⁸

6. Masyarakat

Masyarakat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu; 2 golongan orang-orang yang mempunyai kesamaan tertentu.²⁹

7. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) merupakan organisasi profesi yang menghimpun dan mempersatukan seluruh advokat syariah di Indonesia guna untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat,

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.854.

²⁷Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.Pasal 1 ayat 1.

²⁸Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat 1.

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*], h. 924.

bangsa dan negara secara professional serta bertanggung jawab dengan tidak membedakan suku, agama, keturunan, kedudukan dan golongan.³⁰

Dari beberapa uraian di atas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah Meninjau dari sudut pandang fiqh siyasah terhadap peran Advokat dari APSI Kota Bandar Lampung dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul proposal tersebut adalah:

1. Alasan Objektif

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat itu sangatlah penting. Terlebih lagi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang pengetahuan tentang hukumnya sangat minim. Sehingga mereka bisa mendapati kepastian hukum yang sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Akan tetapi, di Indonesia masih banyak sekali masyarakat yang tergolong tingkat ekonominya rendah dan pengetahuan tentang hukumnya minim itu tidak bisa mendapatkan kepastian hukum yang sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Karena istilah membela yang bayar masih sangat melekat di masyarakat Indonesia. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang sejauhmana peran Advokat dari APSI Kota Bandar Lampung dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

³⁰Profil Singkat APSI” (On-line), tersedia di <http://apsi.web.id/profil-kiprah-anggota-apsi/> (06 Oktober 2019).

2. Alasan Subjektif

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang peran Advokat dari lembaga APSI Kota Bandar Lampung dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.
- b. Tersedianya literatur yang menunjang untuk penyelesaian proposal skripsi ini.
- c. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, maka semua warga negara adalah sama kedudukannya dihadapan hukum (*Equality Before The Law*), oleh karena itu setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum dalam peradilan yang adil dan tidak memihak (*Fair And Impartial Court*).³¹

Banyak terjadi permasalahan hukum di Indonesia saat ini, dikarenakan beberapa hal, antara lain akibat dari lemahnya sistem peradilannya, buruknya mentalitas aparatur hukum, inkonsistensi penegak hukum, intervensi kekuasaan, maupun produk hukum i-relevan dan kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat itu sendiri.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum ini dapat berupa ketidaktahuan akan hukum yang berlaku saat ini ataupun

³¹Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: PT.Elex Media Gramedia Komputindo, 2000), h.46.

ketidaktahuan masyarakat mengenai lembaga bantuan hukum yang bisa membantu memberikan jasa-jasa hukum bagi orang miskin secara cuma-cuma (*pro bono publico*) sehingga setiap orang bisa mendapatkan haknya dalam layanan hukum. Karena profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia, dimana profesi advokat tersebut diwajibkan untuk membela kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, dan sosial ekonomi.³²

Dalam Islam, profesi advokat adalah sebagai salah satu profesi yang penting terutama dalam menegakan keadilan dan hak asasi manusia demi tercapainya kehidupan yang baik dan tertata. Dengan ini jelas bahwa apa yang telah terjadi perwakilan dalam menegakan keadilan harus sesuai dengan hukum Allah.³³

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwasannya dasar legalitas advokat dalam Islam meliputi Alquran, Hadits, dan ijma ulama. Dalam sebuah Hadis disebutkan:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه الحاكم)³⁴

“Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hambaNya menolong saudaranya”. (HR. al-Hâkim).

³²Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*(Bantul:Pondok Edukasi,2003),h. 41.

³³Muhammad Faqih Muslim, *Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2009), h. 6.

³⁴Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Muhammad al-Hâkim, *Al-Mu tadarak ‘alâ Shahîhayn* (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H),h. 427.

Profesi advokat dikenal juga dalam al-qur'an, yaitu dalam Q.S Al-Qashash : 33-34 yang berbunyi :

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾

(القصص: ٣٣-٣٤)

Artinya: Musa berkata: "Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, Maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun Dia lebih fasih lidahnya daripadaku, Maka utuslah Dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku". (Q.S. Al-Qashash: 33-34)³⁵

Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, dan bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap.³⁶

Di dalam Islam pun diajarkan untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebaikan, dan Islam pun mengajarkan umatnya untuk memberikan bantuan bagi yang membutuhkan, sebagaimana firman Allah, QS. Al-Maidah: 2 yang berbunyi :

³⁵Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h.386.

³⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*(Yogyakarta:Liberty,1998), h.16.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : ٢)

Artinya; “tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(Q.S. Al-Maidah : 2)³⁷

Dari ayat diatas menyatakan bahwa Allah menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Di Indonesia sendiri sudah banyak berdiri lembaga-lembaga bantuan hukum, mulai dari lembaga bantuan hukum umum maupun lembaga bantuan hukum syariah. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan APSI merupakan salah satu contoh dari lembaga bantuan hukum yang berbasis syariah. APSI didirikan dan dideklarasikan di Semarang pada tanggal 8 Februari 2003 oleh para praktisi hukum dan syariah.³⁸

Secara umum keberadaan advokat/pengacara yang terhimpun dalam APSI juga berprofesi seperti halnya advokat/pengacara pada umumnya. Keberadaan mereka kemudian diakui untuk memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang berperkara dilingkungan Peradilan Agama. Karena dalam UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diberikan ruang kepada pihak advokat/pengacara untuk

³⁷Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h.106.

³⁸Profil Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) (On-line), tersedia di: <http://www.dpwapsijakarta.org/2016/02/profil-asosiasi-pengacara-syariah.html?m=1> (7 Februari 2019).

mendampingi, membantu, dan/atau mewakili kliennya di Peradilan Agama.³⁹

Sering kali dijumpai bahwasannya peran dari advokat itu tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat itu sendiri, yang di mana seharusnya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma itu memang nyata adanya akan tetapi lain kenyataannya. Masih banyak biro-biro bantuan hukum yang menyatakan memberi bantuan hukum secara cuma-cuma tetapi masih saja meminta imbalan atau *fee* kepada klien sebagai penerima bantuan hukum. Sejatinya bantuan hukum itu memang diberikan kepada orang yang tidak mampu dari segi materi.

Berdasarkan latar belakang tersebutlah, peneliti merasa tertarik untuk membahas mengenai sejauhmana peran Advokat dari lembaga APSI Lampung dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Maka penyusunan skripsi ini diberi judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat (Studi di APSI Kota Bandar Lampung)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Advokat APSI Kota Bandar Lampung dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat?

³⁹Erie Hariyanto dan Ni'matunnuriyah, “Advokat Syariah dalam Mediasi Perkara Perceraian”. *Ulul Albab*, Vol. 18 No. 1 (2017), h.123.

2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran Advokat APSI Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran advokat APSI Kota Bandar Lampung dalam memperjuangkan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap peran advokat APSI Kota Bandar Lampung.

F. Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai peran advokat dari suatu lembaga bantuan hukum.

2. Secara Praktis

- a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latarbelakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.⁴⁰

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.⁴¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah bahan utama dalam penelitian atau data yang dikumpulkan diolah sendiri dari organisasi yang diterbitkan atau menggunakannya. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik

⁴⁰Susiadi, *Metode Penelitian*(Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,2015), h. 10.

⁴¹Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma,2005), h. 58.

dari pada data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di APSI Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan ayat-ayat Alquran, Hadits, ijma ulama, Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Bantuan Hukum, buku-buku yang berkaitan dengan advokat dan bantuan hukum, serta media on-line seperti jurnal dan blog.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.⁴² Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan data⁴³:

a. Pengumpulan data primer.

- 1) Observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dalam penelitian ilmiah ini, dituntut harus dipenuhinya persyaratan-

⁴²Sugiono, *Metode Penelitian bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 402.

⁴³Sujarweni V, Wiratna, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2014), h. 31.

persyaratan tertentu (validitas dan reabilitas), sehingga pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamat.⁴⁴

- 2) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.⁴⁵ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada penerima bantuan hukum dan Advokat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Bandar Lampung.
- 3) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya⁴⁶ yang ada hubungannya dengan penelitian.

b. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder menggunakan cara yaitu mengadakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-

⁴⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 72-73.

⁴⁵Sujarweni V, Wiratna, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, h. 107.

⁴⁶Susiadi, *Metode Penelitian*, h.115.

undangan, serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan metode berfikir yang digunakan adalah pendekatan Induktif, merupakan proses pengambilan kesimpulan (atau pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti.⁴⁷



⁴⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:kencana, 2017), h. 17

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Sejarah dan Definisi Advokat

a. Sejarah Organisasi Advokat di Indonesia

Secara garis besar organisasi advokat di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode penting. Periode pertama merupakan periode awal, yaitu kelahiran dan perintisan organisasi hukum di Indonesia. Periode kedua, yaitu periode dimana organisasi advokat di Indonesia mengalami krisis akibat maraknya intervensi dan pemerintahan serta konflik antar organisasi advokat.

1) Periode Awal Terbentuknya Organisasi Advokat di Indonesia

Berawal dari masa kolonialisme, pada masa itu jumlah dari advokat masih sedikit dan keberadaannya pun masih terbatas pada kota-kota yang memiliki *landraad* dan *raad van justitie*, para advokat tersebut tergabung dalam organisasi advokat yang dikenal dengan “*Balivan Advocaten*” adapun praktisi hukum ini umumnya berkebangsaan Eropa, masih sedikit sekali yang merupakan warga pribumi asli.⁴⁸

Pada masa revolusi fisik Indonesia, sedikit sekali catatan mengenai perkembangan organisasi advokat di Indonesia, dan baru pada tahun 1959-1960 para advokat yang berasal dari Jawa

⁴⁸Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi* (Jakarta: PSHK, 2001), h. 361.

tengah berkumpul di Semarang, dan mendirikan suatu organisasi yang dinamai dengan "Balie" yang diketuai oleh Mr. Soejoedi. Kemudian diikuti dengan munculnya berbagai perkumpulan advokat berskala lokal lainnya seperti "Balai Advokat" di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dan disusul dengan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yaitu dalam kongres 1 Musyawarah Advokat di Hotel Dana Solo.

2) Masa Kritis Organisasi Advokat Indonesia

Beberapa anggota PERADIN yang sudah menikmati kemapanan material yang mereka peroleh sejak pemerintahan Orde Baru samapi merasa perlu untuk mengundurkan diri dari PERADIN dan mendirikan Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI). Akan tetapi yang paling fatal dari revolusi tersebut adalah hilangnya preferensi pemerintahan terhadap PERADIN. Dukungan moril yang pernah diberikan pada tahun 1966 secara diam-diam ditarik kembali.

Ditambah lagi gejala yang berpalingnya pemerintah atas pembentukam LPPH (Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum) oleh Albert Hasibuan pada tahun 1979, yang setelah itu muncul satu persatu organisasi-organisasi lainnya, yang juga berperan sebagai organisasi advokat. Seperti, Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (PUSBADHI), Forum Studi dan Komunikasi Advokat (Forko Advokat), dan Bina Bantuan

Hukum (BBH). Keadaan ini menjadikan kondisi keadvokatan di Indonesia menjadi buruk. Banyaknya organisasi advokat yang ada, menjadikan perlahan menurunnya kewibawaan PERADIN yang kemudian juga diikuti menurunnya kewibawaan praktisi hukum.⁴⁹

Pada tahun 1980-an pemerintah mulai melaksanakan strategi peleburan PERADIN dan organisasi advokat lainnya dalam wadah tunggal yang dapat dikontrol oleh pemerintah. Akan tetapi PERADIN tidak serta merta menyetujui inisiatif ini. Mereka mencurigai bahwa ini adalah salah satu plot untuk menempatkan advokat dibawah pemerintah.

3) Masa Rekonsolidasi dan Reformasi

Pada tahun 1995, pemerintah memfasilitasi dua seminar di Jakarta bagi ketiga organisasi advokat (IKADIN, AAI, IPHI). Hasil seminar tersebut adalah kode etik bersama yang kemudian diadopsi oleh ketiga organisasi tersebut yang kemudian dibawah payung Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI). Kemudian ketiga organisasi tersebut mencapai kemajuan yang signifikan.

Pada tahun 1998 Mahkamah Agung menyetujui mengadopsi kode etik untuk dipergunakan pada seluruh pengadilan di Indonesia. Pemerintah juga memberikan

⁴⁹Nur Firman, "Peran Advokat dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kota Makassar (DPC PERADI)". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Makassar, 2018), h. 8.

kepercayaan kepada FKAi dengan memasukan kode etik yang diakui selama masa transisi sebelum terciptanya wadah tunggal dalam rancangan undang-undang tentang profesi advokat. Dengan ini FKAi telah menunjukan sinyal rekonsolidasi dan membuka kemungkinan bagi organisasi advokat untuk kembali berkembang di masa yang akan datang.

Pada era reformasi pada tanggal 11 Februari 2002 dibentuk sebuah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) lahir berdasarkan kesepakatan tujuh organisasi advokat yang ada, yaitu IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKHPM, SPI, dan HAPI. KKAI menyusun kode etik advokat, melaksanakan ujian advokat pertama di Indonesia, serta membidani lahirnya Undang-Undang Advokat. Saat itu, organisasi advokat yang tergabung dalam KKAI bertambah 1 dari APSI sehingga jumlah organisasi advokat menjadi 8, kemudian pada tanggal 5 April 2003 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pun lahir.⁵⁰

b. Definisi Advokat

Advokat sebagai profesi hukum dalam sejarahnya telah dikenal dengan istilah advokat dan *procereur* dinegeri Belanda, istilah *barissterr* dan *solicitur* di negeri Inggris, istilah *advocate* di

⁵⁰Riyankachfi. "Sejarah dan Organisasi Advokat di Indonesia". (On-line), tersedia di :<http://isiKepalakachfi.wordpress.com/2017/04/28/sejarah-dan-organisasi-advokat-di-Indonesia/> (03 Oktober 2019).

Singapura, istilah lawyer di Amerika Serikat dan sekarang menjadi istilah internasional.⁵¹

Kata advokat, secara etimologis berasal dari bahasa Latin *advocare*, yang berarti *to defend, to call, to aid, to vouch or warrant*. Sedangkan dalam bahasa Inggris *advocate* berarti: *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*.⁵² Guru besar ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa dalam bahasa Perancis, advokat berarti *barrister* atau *counsel, pleader* dalam bahasa Inggris yang kesemuanya merujuk pada aktivitas di Pengadilan.⁵³ Dalam hukum Islam sendiri istilah advokat atau *lawyer* diartikan sebagai *al-mahamy* yang dalam bahasa Arab memiliki arti pengacara.⁵⁴

Subekti membedakan istilah advokat dengan *procureur*. Menurut seorang advokat adalah seorang pembela dan penasihat. Sedangkan *procureur* adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasanya dalam mengajukan perkara-perkara ke pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka pengadilan.⁵⁵

⁵¹ Suhwardi KLubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 1.

⁵² Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*, h. 19.

⁵³ Rosdalina, "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Agama". *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 6 No. 2 (2015), h. 113.

⁵⁴ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, h. 49.

⁵⁵ Rosdalina, "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Agama", h. 113.

Secara terminologis, terdapat beberapa pengertian advokat yang didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan perundang-undangan yang pernah ada sejak zaman kolonial hingga sekarang⁵⁶, seperti dibawah ini:

- 1) Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.⁵⁷
- 2) Advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum, bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasehat sebagai jasa-jasa yang baik, dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan untuk beracara dalam hukum.
- 3) Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada Bab I, Pasal 1 ayat 1, Anggaran Dasar AAI, advokat didefinisikan, termasuk penasehat hukum, pengacara, dan para konsultan hukum.⁵⁸
- 4) Pada Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa :

⁵⁶Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, h. 72.

⁵⁷Yudha pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, (Jakarta: PT. Abadi Jaya, 2001), h. 11.

⁵⁸*Ibid.* h. 12-13.

“Seorang penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.”

5) Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada Bab I Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

6) Menurut surat keputusan menteri hukum dan HAM Nomor : M.03-PR.08.05 TAHUN 1987, Advokat adalah penasehat hukum yang diangkat berdasarkan surat keputusan menteri Hukum dan HAM, adapun ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a) Berdasarkan surat keputusan menteri hukum dan HAM tersebut, telah ditetapkan tempat kedudukannya atau domisilinya pada suatu kota tertentu didalam wilayah Pengadilan Negeri.

b) Pada dasarnya advokat tersebut dapat beracara di muka Pengadilan di semua lingkungan badan, termasuk di Pengadilan Agama di seluruh wilayah Republik Indonesia.

c) Dalam rangka penertiban administrasi pengawasan dan pembinaan maka apabila advokat tersebut akan beracara di muka Pengadilan di luar daerah hukum Pengadilan Tinggi di mana ia berdomisili, maka advokat tersebut wajib

melaporkan diri kepada ketua Pengadilan Tinggi secara tertulis dengan menyampaikan tembusan kepada.

- (1) Mahkamah Agung RI,
- (2) Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dituju,
- (3) Pengadilan Agama yang dituju.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa advokat adalah merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun nonlitigasi dengan mendapat atau tidak mendapatkan *honorarium/fee*.

2. Peran dan Fungsi Advokat

Peran dan fungsi advokat dapat diketahui dari definisi di atas, yaitu sebagai pemberi bantuan hukum yang dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan, mencakup seluruh masalah hukum public maupun hukum privat.

Secara normatif, Undang-Undang advokat telah menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum. Menegakan hukum lazim diartikan sebagai mempertahankan hukum atau *"reshtshanhaving"* dari setiap pelanggaran atau penyimpangan. Hukum diartikan dalam arti luas, baik hukum sebagai produk kekuasaan public (*law as command of the sovereign*).

Secara sosiologis, ada suatu jenis hukum yang mempunyai daya laku lebih kuat dibanding hukum yang lain. Didapati hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak dengan hukum yang nyata hidup dalam

masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, peran advokat dalam menegakan hukum akan berwujud, yaitu⁵⁹:

- a. Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara
- b. Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual dan sosial.
- c. Mendorong agar hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Karena itu salah satu asas yang paling penting dalam pembelaan, apabila berkeyakinan seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas "*clemency*" atau sekedar memohon keadilan.

Banyak orang yang beranggapan ruang lingkup pekerjaan advokat hanyalah berkaitan dengan beracara di pengadilan atau pekerjaan litigasi. Sebenarnya masih terdapat begitu banyak pekerjaan advokat di luar bidang litigasi, yang disebut dengan pekerjaan non-litigasi yang meliputi pemberian layanan hukum (*legal service*), nasihat hukum (*legal advice*), pendapat hukum (*legal opinion*), menyusun kontrak (*legal drafting*), memberikan informasi hukum dan membela serta melindungi hak asasi manusia.⁶⁰

⁵⁹Bagir Mannan, "Peran Advokat Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa". Majalah Hukum, 1 April 2005, h. 25.

⁶⁰Harlen Siaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 20.

Bentuk bantuan non-litigasi lain yang diatur adalah penyuluhan hukum, investasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau drafting dokumen hukum.

Pekerjaan non-litigasi di Indonesia memiliki kesamaan dengan tugas *socilitor*, yaitu mereka yang dapat melakukan pekerjaan di bidang hukum tetapi tidak tampil di pengadilan. Sedikit mirip dengan hal itu, fungsi advokat di Amerika Serikat dapat dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu: advokat yang mewakili pekerjaan di pengadilan, advokat sebagai penasihat, advokat sebagai juru runding.

3. Tugas Advokat

Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek) adalah untuk memberikan *legal opinion*, serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasehat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya.⁶¹

Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok penasehat hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang keterikatan dengan klien yang dibela olehnya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk membela putusan yang seadil-adilanya.

⁶¹C. S. T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 58.

Tugas seorang advokat bukanlah merupakan pekerjaan (*vaction beroep*), tetapi lebih merupakan profesi. Profesi advokat disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) seperti hakim, jaksa, dan polisi yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa terkecuali. Advokat tidak bisa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, keyakinan politik, dan gender. Profesi advokat meliputi unsure manusia dengan kualitas dan kuantitas tertentu yang diperlukan untuk menjalankan tugas profesinya. Selain itu, advokat juga dapat dilihat sebagai institusi atau organisasi profesi yang bertanggung jawab dalam mengelola profesi advokat serta memastikan bahwa setiap advokat memiliki kualitas dan kuantitas yang ditentukan.⁶²

Advokat sebagai profesi yang mulia yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian advkat yang berpegang teguh pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan.⁶³ Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsi Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga penegak hukum lainnya seperti pengadilan, jaksa, dan kepolisian. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan

⁶²Harlen Siaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, h. 20.

⁶³Kuat Puji Prayitno, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2010), h. 96.

tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat terkhusus pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum. Advokat sebagai salah satu unsure sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

4. Advokat dalam Fiqh Siyasah

a. Advokat dalam Fiqh Siyasah

Berdasarkan ruang lingkup fiqh siyasah, advokat terdapat pada pembahasan *Siyâsah Qadlâ'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan). *Siyâsah Qadlâ'iyah* merupakan ketentuan kebijaksanaan mengenai tugas dan wewenang peradilan yang ada di suatu Negara. Karena Negara merupakan sekumpulan pemahaman dan keyakinan yang diterima oleh umat. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah lembaga peradilan dalam Negara. Dengan lembaga ini bertugas menyampaikan keputusan baru yang bersifat mengikat. Lembaga ini merupakan *thariqah syar'iyah*⁶⁴ (metode syariah) dimana mempunyai tugas untuk menjaga keberlangsungan penerapan pemahaman, standarisasi, dan keyakinan. Keberadaan lembaga ini hukumnya wajib.

Qhodi atau hakim menjalankan hukum Islam kepada seluruh rakyat dan mengambil putusan-putusan berdasarkan syariat. Oleh

⁶⁴Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyariyyah)" (on-line), tersedia di: <http://pa-purworejo.go.id/web/peradilan-dala-politik-islam-al-qadhaiyyah-fis-sivasah-assvariyyah/> (9 Juni 2019).

karena itu, peradilan merupakan salah satu pilar yang fundamental dalam Negara Islam. Inilah sistem pemerintahan yang di sandarkan sebagai bagian implementasi Islam dalam kehidupan politik.

Disamping adanya hakim dan lembaga peradilan, kini telah ada ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan yang disebut sebagai advokat. Advokat memiliki status sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, dimana telah dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undang. Artinya adalah profesi advokat bisa disamakan kedudukannya dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan, yaitu seperti hakim dan kepolisian. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam Islam advokat dikenal dengan *al-wakalah* atau *al-Wakilah*. Karena sistem wakalah dipengadilan banyak kemiripan dengan sistem advokat atau pengacara. Menurut bahasa, *wakalah* atau *al-wakilah* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mura'at wa al hifzu*, dan *al tafwid al-i'timad* yang berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kuasa kepada seseorang.⁶⁵ Menurut para fuqaha *wakalah* adalah memberi kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan. Wakalah juga

⁶⁵Asumni Mth, "Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam". *Jurnal Hukum Islam*, Vol 12 No. 4 (2014), h. 27.

merupakan bentuk transaksi (akad) yang bersifat tolong menolong.⁶⁶

b. Dasar Hukum Advokat

Para ahli fiqh menyatakan, bahwa akad advokat atau wakalah dibolehkan dalam Islam. Dasar hukum dari kebolehan tersebut antara lain :

1) Dalil Al-Qur'an

a) Q.S Al-Kahfi ayat 19, yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ
كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ
أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (الكهف : ١٩)

Artinya: Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.(Q.S. Al-Kahfi :19)⁶⁷

⁶⁶Ibid, h. 28.

⁶⁷Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*,h. 295.

Dari ayat diatas, jumhur ulama membolehkan berwakil dalam segala hal termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Dalam berperkara, menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan umat dirinya: misalkan karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam suatu perkara, seperti pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat, dan penolakan tuduhan atau gugatan.⁶⁸

b) Dalil Hadits

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بَعَثَ أَبَا
رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَوْحَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ (رواه مالك:

(٦٧٨

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rasulullah Saw mengutus Abu Rafi' dan laki-laki dari kalangan anshar. Mereka berdua menikahkan beliau dengan Maimunah binti al Harits, sedangkan beliau masih berada di Madinah dan belum berangkat. (H.R Malik : 678)⁶⁹

⁶⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. IkhtiarBaru Van Hoeve, 1996), h. 981.

⁶⁹Malik bin Anas al-Ashabihi, *Al-Muwaththa'* (Beirut: Daar Kutun al-'Alamiyah), h. 250.

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya.

c) Dalil Ijma'

Secara umum, tidak ada perselisihan antar ulama mengenai bolehnya mewakilkan dalam suatu persengketaan baik dalam harta, pernikahan, dan sejenisnya. As-Sarakhsi (490 H) berkata, "Perwakilan dalam pengadilan sudah ada sejak jaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* hingga hari ini tanpa adanya pengingkaran dari siapa pun." As-Sumnani (449 H) menjelaskan tentang pengacara, "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga pernah mewakilkan, demikian pula para imam yang adil dari kalangan sahabat dan tabi'in." Dan hal ini pula diamalkan oleh manusia di semua Negara.

5. Bantuan Hukum dalam Islam

a. Pengertian Bantuan Hukum dalam Islam

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dalam bahasa Arab kuasa hukum disebut dengan *al-wakalah fi al-khusumah*. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Al-wakalah disini

masih bersifat umum, mencakup segala aktifitas perwakilan dalam bidang muamalah, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa, dan lain sebagainya. *Al-wakalah fi al-khusumah* (kuasa hukum) sendiri secara khusus ditemukan dalam perkara atau sengketa di pengadilan. Sifat *wakalah* yang mewakili urusan orang lain, identik dengan perwakilan seseorang untuk membantu menyelesaikan sengketa, terutama dalam proses peradilan.⁷⁰

b. Kategori Bantuan Hukum dalam Islam

Dalam Islam terdapat tiga kategori profesi yang menjalankan tugas dan fungsi dalam memberikan jasa bantuan hukum, yaitu *hakam*, *mufti*, dan *mushalaih-alaih*. Ketiganya memiliki fungsi yang sama seperti halnya advokat, pengacara, arbiter, konsultan hukum, atau penasihat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan sengketa, serta mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat kepada para pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara *islah*.

1) Hakam

Secara harfiah hakam dalam perspektif Islam adalah orang yang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian

⁷⁰Inda Areskha, "Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)". (Skripsi Program Sarjana Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), h. 17.

sengketa. Dalam kajian fiqh Islam penunjukan hakim disebut dengan tahkim. Tahkim berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja *hakkama-yuhakkimu-tahkiman* yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa.⁷¹

Menurut ahli fiqh,⁷² tahkim diartikan sebagai dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang di antara mereka untuk menyelesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara' atas sengketa mereka itu.

Profesi hakim telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 35 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء : ٣٥)

Artinya: *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa : 35)*⁷³

Pada masa Rasulullah ahkam memiliki peran yang sangat luas tanpa adanya batasan bidang tertentu, serta memiliki wilyah

⁷¹Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 39.

⁷²T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 81.

⁷³Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 84.

yurisdiksi yang tidak hanya berkaitan dengan perkara bisnis semata, akan tetapi menyangkut masalah keluarga, politik, perdagangan, dan peperangan.

Tugas dari hakim bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation beroep*), akan tetapi lebih merupakan profesi. Profesi hakim bukan hanya sekedar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah (*profit oriented*), profesi tersebut mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Profesi hakim sering kali disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial, ekonomi, kaya, miskin, keyakinan politik, gender, dan ideologi seseorang. Sebagai konsekuensinya ia harus menjalankan fungsinya untuk membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya.

2) Mufti

Secara etimologis, mufti berarti orang yang member fatwa. Fatwa (*legal advise*), adalah menjawab sesuatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya. Secara terminologis mufti adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia.⁷⁴

⁷⁴T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 86.

Memberikan fatwa pada dasarnya sama dengan memberikan nasehat kepada seseorang tentang sesuatu yang belum diketahuinya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S al-Ashr ayat 1-3 :

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾ (العصر: ١-٣)

Artinya: *demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.* (Q.S al-Ashr ayat 1-3)⁷⁵

Sumber hukum fatwa lainnya adalah berasal dari As-Sunnah, sebagaimana Rasulullah Saw mengatakan, bahwa *addinunnashihah*; agama adalah nasehat. Karena memberikan nasehat sama dengan menjalankan kewajiban *ya'murunabilmakruf watanhauna anil fakhshaiwalmunkar*; memerintahkan berbuat kebaikan dan melarang melakukan kejahatan.

3) Mushalih-alaih

Secara harfiah kata mushalih berasal dari akar kata *ash-shulhu-yushilhu-mushalih*. Ash-shulhu yang berarti memutus pertengkaran atau perelisihan. Secara terminologi adalah suatu

⁷⁵Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 601.

jenis aqad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.⁷⁶

Akad (perjanjian) merupakan hak setiap orang dan dapat dibenarkan apabila perjanjian itu dalam hal yang baik. Perjanjian biasanya dilakukan oleh orang atau kelompok terhadap suatu hal yang telah disepakati. Perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali oleh kedua pihak yang melakukan perjanjian, dan pembatalan perjanjian tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak baik disengaja ataupun tidak. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua orang dapat menepati perjanjian. Maka dari akan timbul perlawanan dari pihak lain sehingga akan menjadi suatu perselisihan atau persengketaan para pihak yang melakukan perjanjian.

Mendamaikan perselisihan diantara manusia merupakan kewajiban dan termasuk pekerjaan yang mulia (*offisium nobile*). Allah berfirman dalam Q.S al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الحجرات : ٩)

⁷⁶Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, h. 51.

Artinya: *dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.* (Q.S. Al-Hujurat: 9)⁷⁷

Ayat di atas mengisyaratkan apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran maka harus diupayakan penyelesaian damai bila salah satu pihak melakukan pelanggaran dalam perjanjian tersebut harusla diberi sanksi hukum secara tegas. Sanksi hukum dalam hal ini harus melaksanakan kewajiban atau mengembalikan hak orang lain yang dirampasnya. Bila sudah melaksanakan kewajiban tersebut maka damaikan kembali secara adil dan benar sesuai asas keadilan hukum.

c. Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum dalam Islam

Menurut Didi Kusnadi⁷⁸, dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai advokat maka hendaknya memperhatikan prinsip penegakan hukum Islam yang sesuai dengan prinsip filsafat hukum Islam sebagai berikut:

1) Prinsip Ketuhanan

Prinsip ketuhanan (*al-tauhid*) dapat dijadikan pedoman oleh setiap advokat, pengacara, klien dan aparaturnya penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Dalam prinsip ini, maka siapa

⁷⁷Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h.516.

⁷⁸DidiKusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.66.

pun yang terlibat dalam penegakan hukum harus meyakini bahwa pembuat hukum yang mutlak adalah Allah. Maka dalam hal ini segala bentuk upaya yang telah dilakukan dalam proses penegakan hukum hendaklah didasari oleh kesadaran bahwa dalam menegakan hukum itu harus dengan kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan hukum yang tidak menyalahi hukum Allah.

Dalam kenyataannya, sumpah merupakan suatu hal yang penting sebagai bentuk komitmen seseorang dalam menegakan hukum di hadapan Allah. Sumpah merupakan sesuatu yang sakral, apabila sumpah itu dilanggar maka akan mendapatkan sanksi moral maupun hukum yang harus dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, masyarakat, pejabat yang menyumpah dan terlebih tanggung jawab kepada Allah.⁷⁹


Dalam Islam sumpah adalah pernyataan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang telah dikuatkan dengan kalimat sumpah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'.

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah : 224-225

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا
بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيْ

⁷⁹Ibid, h.191.

أَيْمَنِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

(البقرة : ٢٢٥-٢٢٤) 

Artinya: Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan ishlah di antara manusia. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-Baqarah : 224-225)⁸⁰

Sumpah yang telah diucapkan oleh seseorang atau kalimat yang disumpahkan kepada seseorang dalam menjalankan suatu profesi tertentu maka mempunyai konsekuensi moral dan yuridis yang harus dipertanggungjawabkan.

Secara Terminologi sumpah adalah mengikat jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan untuk mengerjakannya, yang di perkuat dengan sesuatu yang telah diagungkan bagi orang yang bersumpah baik secara nyata maupun secara keyakinan saja.⁸¹ Maka sumpah profesi yang telah dilakukan oleh advokat merupakan janji yang diucapkan untuk memberikan keteguhan hati nurani dalam menjalankan tugas dan fungsi dari profesinya, sehingga tidak akan menyimpang dari aturan yang telah dibuat.

⁸⁰Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 35.

⁸¹Abdul Djalal, H.A, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Dunia Ilmu, 1998), h. 346

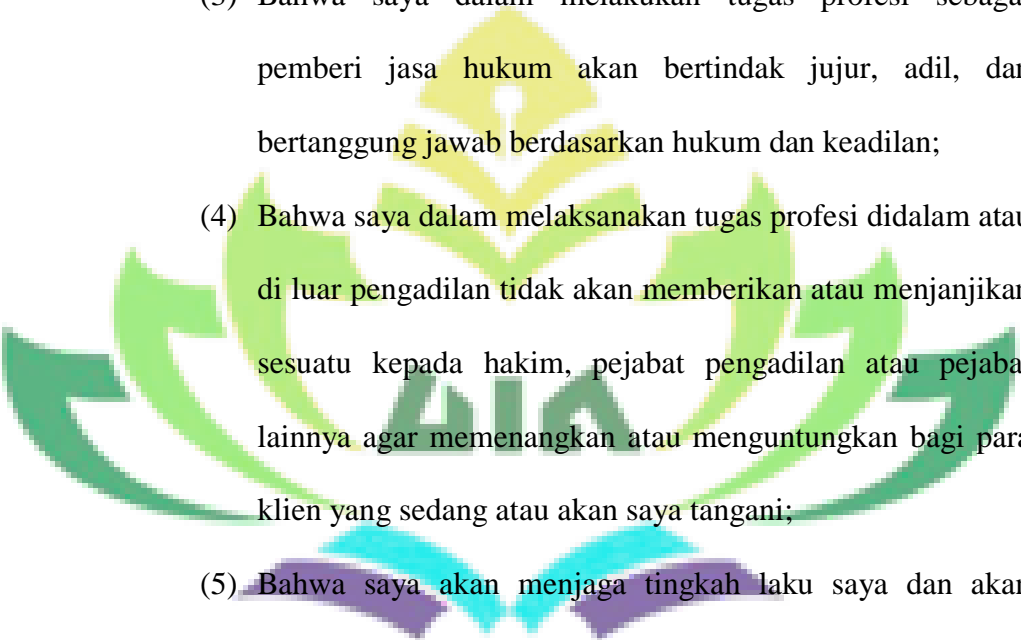
Sumpah advokat tersebut tercantum dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Sumpah tersebut yang berbunyi :

- a) Saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia; bahwa saya berkewajiban untuk menghormati pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman
- b) Bahwa saya, langsung maupun tidak langsung menggunakan nama atau dalih apa pun juga untuk memperoleh jabatan saya, telah atau akan memberi atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga;
- c) Bahwa saya tidak akan menganjurkan seseorang untuk berperkara atau membela suatu perkara yang tidak saya yakin ada dasar hukumnya.

Sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah atau berucap janji menurut agama atau kepercayaan masing-masing dalam satu sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukum. Sumpah atau janji sebagaimana tersebut dalam ayat (1) yang lafalnya⁸² sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji”:

⁸²Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.Pasal 44.

- 
- (1) Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
 - (2) Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
 - (3) Bahwa saya dalam melakukan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
 - (4) Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi didalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi para klien yang sedang atau akan saya tangani;
 - (5) Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
 - (6) Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

2) Prinsip Keadilan

Pemberian bantuan hukum erat kaitannya dengan prinsip *access to justice* yang diusung oleh kalangan advokat atau pengacara, yang diarahkan bagi penguatan aspek permintaan meliputi: *pertama*, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak dasar; *kedua*, meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap kebijakan hukum positif dan hukum adat yang berdampak pada kehidupan mereka; *ketiga*, meningkatkan pengetahuan tentang berbagai saluran untuk mendapatkan pemulihan hak-hak yang dilanggar dan tidak dipenuhi.

Prinsip keadilan menurut al-Qur'an, manusia memiliki kewajiban untuk menegakan hukum Allah dan dilarang dalam menerapkan hukum lainnya yang bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan Allah. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Q.S. al-Maidah ayat 42 dan 49 :

a) Ayat 42 yang berbunyi :

وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المائدة : ٤٢)

Artinya: *dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.* (Q.S al-Maidah : 42)⁸³

⁸³Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 115.

Ayat diatas menjelaskan bahwa harus berlaku adil dalam memberikan putusan jasa hukum kepada klien, agar pada saat iadikalahkan harus menerima dengan kekalahannya dengan lapang dada.Begitupun sebaliknya, saat dia menerima kemenangan harus menerima kemenangan tersebut sebagai pengembalian hak.Karena seorang advokat memang haruslah mampu memberikan keterangan secara baik kepada kliennya untuk membela kebenaran dan keadilan, bukan membela kliennya untuk kemenangan. Karena asensi dari proses peradilan adalah bukan menang atau kalah, tetapi berkeadilan untuk memberikan hak kepada orang lain.

b) Ayat 49 yang berbunyi :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّهُ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ
كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (المائدة : ٤٩)

Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya

*kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Q.S al-Maidah : 49)*⁸⁴

Menurut Abduh dalam tafsirnya dijelaskan bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan tanpa memenuhi dua unsur. *Pertama*, memahami aregumentasi kedua pihak berperkara. *Kedua*, jujur dan bersih, tidak memihak atau membenci salah satu pihak, semua keputusan yang menyimpang dari kedua unsur tersebut adalah kezaliman.⁸⁵

Sebagai advokat dituntut untuk berlaku adil, karena tanpa keadilan akan memunculkan keberpihakan kepada pemilik uang dan banyak hal yang menyengsarakan sebagaimana yang terjadi dibanyak negara, termasuk negara Indonesia. Bahkan kebencian kepada seseorang tidak boleh menghalangi seseorang untuk berlaku adil. Maka dari itu advokat harus berlaku adil dalam keadaan bagaimanapun agar terwujudnya kesejahteraan.

Dalam hal ini keadilan seorang advokat bukan berarti memihak kepada kesalahan klien. Namun agara klien tersebut mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Apabila bersalah katakana salah, dan jika benar buktikan kebenaran tersebut. Itulah arti keadilan yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh advokat.

⁸⁴*Ibid*, h. 116.

⁸⁵Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, tt, Juz V, h. 175.

Dalam pemberian bantuan hukum, advokat harus berani bertindak apabila klien yang sedang dibelanya dizalimi oleh keadilan. Kejadian seperti ini sering kali terjadi dalam pengadilan. Karena di dalam negara yang miskin integrasi, hukum bisa dibeli baik melalui hakim ataupun jaksa dan polisi. Dalam hal ini advokat haruslah bersikap tegas dalam memberikan bantuan hukum kepada klien, untuk mewujudkan keadilan yang sesuai dengan kode etik dan Undang-Undang yang mengatur profesinya.

3) Prinsip Kebebasan (*al-hurriyah*)

Menurut prinsip ini, manusia memiliki hak/kebebasan dalam hal menentukan pilihan hidupnya, tetapi hak/kebebasan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah.⁸⁶ Penjelasan tersebut tercantum dalam Q.S al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٥٦)

Artinya: tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghudan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan

⁸⁶DidiKusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, h.67.

putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. al-Baqarah : 256)⁸⁷

4) Prinsip Hak atas Advokasi

Setiap warga negara yang sedang berperkara berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum dari seorang advokat. Dalam prinsip ini seorang terdakwa/tersangka harus memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan siapa yang akan menjadi pengacaranya. Disebutkan dalam Q.S an-Nisaa' ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء : ٣٥)

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S. an-Nisaa' : 35)⁸⁸

Dari ayat di atas disebutkan perlunya seorang pendamping dalam memutuskan perkara dalam suatu sengketa dalam lingkup keluarga. Seorang pendamping hukum dalam islam disebut dengan Hakam. Hakam yang disebut dalam ayat diatas bukan hanya mengurus masalah konflik keluarga, namun dalam kasus pidana juga. Hakam dalam ayat diatas adalah dari semua pihak baik laki-laki maupun dari pihak perempuan. Bukan hanya salah

⁸⁷Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 42.

⁸⁸*Ibid*, h. 84.

satu pihak. Artinya dalam setiap kasus yang terjadi di wilayah hukum, membutuhkan seorang hakim bukan hanya saksi.⁸⁹

Seorang tersangka/terdakwa bebas menentukan siapa yang akan menjadi advokatnya dalam menyelesaikan perkaranya. Dan negara harus menjamin bahwa tersangka/terdakwa memiliki hak untuk memilih advokatnya dan tidak dipaksa untuk menerima advokat yang telah ditunjuk oleh pengadilan kepadanya, negara pun harus menjamin kompetensi advokat yang akan memberikan bantuan hukum secara impersial.

Negara pula harus menjamin bahwa akses bantuan hukum disetiap tingkat pemeriksaan. Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi yang telah dibuat secara profesional.

5) Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum

Berdasarkan prinsip ini, advokat haruslah dapat calon memposisikan kliennya sama dihadapan hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya prinsip ini sering dilanggar. Orang yang kaya atau memiliki kekuasaan akan mendapatkan *privilege* (hak istimewa). Dalam al-Qur'an ayat yang mempertegas masalah ini adalah Q.S Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

⁸⁹Abdul Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 266-267.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ (الحجرات : ١٣)

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.* (Q.S. al-Hujurat : 13)⁹⁰

Ayat di atas membahas tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, ayat ini tidak menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Penggalan pertama ayat ini, "...sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan..." adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan pada nilai kemanusiaan anatara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁹¹

Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini yakni "Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa." Oleh karena itu, berusaha untuk meningkatkan

⁹⁰Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 517.

⁹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 615-618.

ketakwaan supaya menjadi manusia yang lebih mulia di sisi Allah. Dalam ayat ini menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar jika seseorang berbangga diri dan merasa dirinya lebih baik dari pada yang lain, bukan saja antar satu bangsa, suku, atau warna kulit dan sejenisnya, tetapi antara jenis kelamin mereka.⁹²

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan kedudukan antar manusia bukan terletak dari suku, bangsa, ras, kasta, warna kulit atau sebagainya. Tetapi yang membedakannya adalah ketakwaan. Sehingga dapat diartikan bahwa manusia diciptakan memiliki hak persamaan antara sesama manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.

Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) telah dikenal dan dipraktikkan dalam Islam sejak abad ke-7. Suatu saat ketika Nabi Saw melaksanakan Haji Wada'. Dalam pidatonya nabi menyampaikan, "Bahwa Tuhan kamu itu Esa, dan bapak kamu (adam) pun satu. Kamu semua dari Adam dan Adam dari tanah. Tiada kelebihan bagi orang Arab terhadap non Arab dan non Arab terhadap Arab. Tiada kelebihan bagi yang berwarna putih terhadap yang berwarna merah kecuali dengan

⁹²*Ibid.* h. 619-620.

takwa. Sesungguhnya aku telah sampaikan! Tuhanku! Saksikanlah!.

Dalam hal ini, seorang advokat saat menjalankan tugasnya haruslah adil. Tidak pernah membedakan antara orang kaya atau miskin. Karena semua sama di hadapan hukum. Dan pemberian sanksi untuk tersangka/terdakwa telah didasarkan pada undang-undang tidak bisa didasarkan kepada keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

6) Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar

Pada hakikatnya *Amar ma'ruf nahi munkar* terdapat empat penggalan kata yang apabila dipisahkan satu sama lain mengandung pengertian sebagai berikut: *amr*, *ma'ruf*, *nahi*, dan *Munkar*. Manakala keempat kata tersebut digabungkan, memiliki arti menyuruh yang baik dan melarang yang buruk.⁹³

Salman al-Audah mengemukakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah segala sesuatu yang diketahui oleh hati dan jiwa tentram kepadanya, segala sesuatu yang di cintai oleh Allah SWT. Sedangkan nahi munkar adalah yang dibenci oleh jiwa, tidak disukai, dan dikenal serta sesuatu yang dikenal keburukannya secara syar'i dan akal.⁹⁴

⁹³Khairul Umam dan A Ahyar Aminuddin, *Usul Fiqh II* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 97.

⁹⁴Salman Bin Fahd Al-Audah, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, terjemahan Ummu 'udhama' azmi (Solo: Pustaka Mantiq), h. 13.

Sedangkan Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan tuntunan yang diturunkan Allah dalam kitab-kitabnya, disampaikan rasul-rasulnya, dan merupakan bagian dari syariat Islam. Adapun pengertian nahi munkar menurut Ibnu Taimiyyah adalah mengharamkan segala yang buruk kekejian, segala amar ma'ruf berarti menghalalkan semua yang baik, karena itu yang mengharamkan yang baik termasuk larangan Allah.⁹⁵

Dalam al-Qur'an tidak kurang dari 38 kata *al-ma'ruf* dan 16 kata *al-munkar*. Dalam Q.S al-Imran ayat 104 disebutkan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الإمران: ١٠٤)

Artinya: *dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. al-Imran : 104)*⁹⁶

Ayat diatas lebih menjelaskan tentang untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran atas iman, padahal iman merupakan dasar bagi setiap amal shalih, sebagai syarat tentang pentingnya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, diamana umat Islam dikenal dengannya, bahkan ia merupakan cirri utama yang

⁹⁵Ibnu Taimiyah, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, terjemahan Abu Fahmi (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.15.

⁹⁶Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 63.

membedakannya dari umat-umat lainnya, dan dilahirkan bagi umat manusia untuk melaksanakan kewajiban mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan tugas kembar yang harus digunakan oleh seorang advokat secara simultan dan sikap untuk merespons tugas-tugasnya dalam segala bidang kehidupan, dengan catatan sesuai dengan kadar dan kemampuan.⁹⁷ Imam Ghazali menyebutkan bahwa doktrin amar ma'ruf nahi munkar merupakan kutub terbesar agama. Berarti, bahwa masalah tersebut merupakan pokok dan mesti ada sebagai ciri dan watak dasar dari umat Islam yang dapat menentukan eksistensi dan kemulyaan umat.⁹⁸ Oleh sebab itu, seorang advokat harus dapat menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan menggunakan wewenang dan kekuasaannya.

Mengajak pada kebaikan adalah ciri utama orang-orang beriman. Allah selalu menyebutkan jika orang yang beriman di dalam al-Qur'an adalah amal ma'ruf dan nahi munkar dengan berbagai redaksi. maka sebagai masyarakat muslim haruslah menjadi masyarakat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, karena kebaikan Negara dan rakyat tidak sempurna. Dalam Q.S al-Hajj ayat 41 dijelaskan :

⁹⁷Bambang Widjoyanto, *Koruptor itu Kafir* (Bandung: Mizan, 2010), h. 12.

⁹⁸*Ibid.*

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
(الحج: ٤١)

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Q.S. al-Hajj : 41)⁹⁹

Ayat ini mengajak untuk setiap muslim dalam melaksanakan kebaikan di dunia dan akhirat, melaksanakan rukun-rukun Islam yang tertera di ayat tersebut. Melaksanakan kebaikan setiap muslim dengan mengamalkan ajaran dan berbuat ma'ruf untuk semua nilai, maksudnya menjalankan dan membantu orang-orang yang kesusahan, Allah selalu memudahkan kepada orang-orang yang berbuat baik.¹⁰⁰

Perbuatan yang ma'ruf dengan cara beribadah kepada Allah yang selalu memberikan kemudahan dan pencerahan untuk umatnya, menunaikan zakat bagi orang yang mampu karena peduli pada orang yang ada disekelilingnya yang masih membutuhkan bantuan dalam bentuk apapun. Kedudukan di muka bumi sangatlah sederhana, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, yang selalu dijalankan dengan menjauhkan diri pada keburukan yang akan menyesatkan diri kelak, dalam hal ini sebagai umat Islam harus melihat dan memperhatikan apa

⁹⁹Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 337.

¹⁰⁰M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001), h. 143.

yang telah diperuat selama ini dengan kebaikan atau keburukan.¹⁰¹

7) Prinsip Tolong Menolong

Pada masa Rasulullah tidak ada seorang muslim pun yang membiarkan muslim lain dalam keadaan kesulitan. Hal ini sudah tergambar sangat jelas ketika umat muslim hijrah dari Mekkah ke Madinah. Kaum ansor atau muslim Madinah menerima dengan baik kedatangan mereka yang seiman dengan sambutan yang meriah, kemudian mempersilahkan segalanya bagi para muhajirin. Hal tersebut ditegaskan dalam Q.S al-Taubah ayat 71:



وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة : ٧١)

Artinya: dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Taubah : 71)¹⁰²

Ayat diatas menerangkan bahwa setiap muslim sama di mata Allah kecuali karena perbuatan dan keimanan mereka.

¹⁰¹Ibid.

¹⁰²Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 198.

Anjuran untuk menolong dalam kebaikan dan takwa, yaitu fungsi mahammy, hakim, arbiter atau mushalih alaih selain memberikan jasa bantuan hukum juga bisa menjadi mediator profesional dalam proses penegakan hukum Q.S al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : ٢)

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Maidah : 2)¹⁰³

Dari ayat diatas Allah mengajak untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Karna didalam ketakwaan, terkandung ridha Allah. Barang siapa yang memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.

Kewajiban pertama dari seorang advokat dengan klien akan tercapai dengan cara memberi nasehat hukum (*legal advice*), perbuatan baik dan perhatian terhadap perkara ini. Dan kewajiban kedua (antara hamba dengan Tuhan), akan terwujud melalui menjalankan hak tersebut dengan ikhlas, cinta dan penuh penuh pengabdian kepada-Nya. Ketika seorang advokat

¹⁰³Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah* ..., h. 106.

menjalankan tugasnya tidak boleh berharap pahrih sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU advokat.

8) Prinsip Hak Allah dan Hak Manusia (*haq al-Allah wa haq al-adami*)

Dalam prinsip ini, manusia diberi hak/kebebasan untuk melaksanakan hukum Allah pada batas-batas kewajaran yang telah ditentukan oleh Allah.¹⁰⁴ Ketentuan ini tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة :
١٧٨)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. al-Baqarah : 178)¹⁰⁵

¹⁰⁴DidiKusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, h.67.

¹⁰⁵Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 27.

9) Prinsip Musyawarah

Musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu *syara* yang berarti menampakan sesuatu atau mengeluarkan madu dari sarang lebah. Maka dari itu musyawarah dapat diartikan menampakan sesuatu yang awalnya tersimpan atau mengeluarkan pendapat yang baik kepada orang lain. Dalam al-Qur'an prinsip musyawarah dijelaskan dalam Q.S al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
(الإمران: ١٥٩)

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. al-Imran : 159)*¹⁰⁶

. Ayat di atas dengan tegas menyatakan “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,” Islam menetapkan prinsip musyawarah dalam system pemerintahan, nabi Muhammad Saw menerapkan prinsip musyawarah ini.

¹⁰⁶Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 71.

Dalam advokasi, musyawarah merupakan upaya hukum non litigasi yang bisa dilakukan dengan cara mengundang pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan perkara yang sedang terjadi. Tujuan musyawarah dalam advokasi adalah untuk mencari titik temu penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi oleh klien. Namun musyawarah ini tidak ada salahnya apabila dilakukan tak lebih dari dua kali untuk mencegah berlarut-larutnya penyelesaian perkara, bila ternyata tidak kunjung mendapati titik temu maka barulah di tempuh melalui jalur hukum kepengadilan.¹⁰⁷

Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang menjelaskan tentang musyawara. Adapun ayat lainnya terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 233:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
(البقرة : ٢٣٣)

Artinya: *maka jika dia menghendaki perpisahan dari keridhaan diantara keduanya dan musyawarah maka tidak ada dosa bagi mereka berdua. (Q.S. al-Baqarah : 233)*¹⁰⁸

Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak. Kasus yang dialami oleh sepasang suami istri dalam ayat ini adalah tentang jangka waktu seorang ibu harus

¹⁰⁷Sartono, Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), h. 129.

¹⁰⁸Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 37.

menyusui anaknya. Suami istri tersebut boleh menyapeh anaknya dengan persetujuan satu sama lain setelah melakukan musyawarah.

Ayat berikutnya terdapat dalam Q.S al-Talaq ayat 6:

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاُتْرَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ
(الطلاق: ٦)

Artinya: *Dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.* (Q.S. al-Talaq : 6)¹⁰⁹

Ayat diatas tidak menggunakan kata musyawarah, akan tetapi menggunakan kata *I'tamaru* yang melahirkan kata muktamar.¹¹⁰ Rasulullah Saw pun pernah melakukan musyawarah. Diantaranya terdapat dalam Q.S Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (الشورى: ٣٨)

Artinya: *dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.* (Q.S. Asy-Syura : 38)¹¹¹

Dari ayat diatas dijelaskan mengenai keadaan kaum muslim Madinah yang bersedia membela nabi sebagai hasil kesepakatan

¹⁰⁹ *Ibid*, h. 559.

¹¹⁰ Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial* (Yogyakarta: eLSAQ, 2005), h. 155.

¹¹¹ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah* ..., h. 487.

dari musyawarah. Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus menjadi pelopor musyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi pada kelompok yang dipimpinnya.

10) Prinsip Toleransi (*at-tasamuh*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa manusia berkewajiban bersikap toleransi dalam menghargai perbedaan keyakinan dan agama serta memiliki hak/kebebasan untuk memilihnya berdasarkan keyakinan masing-masing.¹¹² Telah dijelaskan dalam Q.S al-Kafirun ayat 1-6 :

قُلْ يَتَّيِّهُوا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾ (الكافرون : ١-٦)

Artinya: Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." (Q.S. al-Kafirun : 1-6)¹¹³

B. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, hingga saat ini telah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas mengenai keadvokatan.

¹¹²DidiKusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, h.67.

¹¹³Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 603.

Untuk itu penulis dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

Skirpsi Indah Areskha, 2017. Fakultas Syariah. UIN Raden Intan Lampung, “Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)”.Peneliti ini membandingkan antara dua produk hukum, yaitu bantuan hukum dalam hukum positif dan bantuan hukum dalam Islam.Dalam hukum positif sendiri bantuan hukum merupakan salah satu hal yang penting untuk mewujudkan keadilan konstitusional bagi fakir miskin dan menjadi bagian penting dari konsekuensi negara hukum. Dalam hukum Islam mengajarkan agar setiap pemeluknya melindungi hak-hak individu, bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama serta adanya kewajiban dalam menegakan hukum dan keadilan setiap individu.

Vivin Sariyanti, 2018. IAIN Bengkulu, “Peran Advokat Non Muslim dalam Membela Klien Muslim Ditinjau dari Hukum Islam”. Dalam penelitiannya Vivin sariyanti, fokus pada peranan advokat non muslim yang membela klien muslim di Pengadilan Agama. Dia juga menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap peranan advokat non muslim yang membela klien muslim tersebut.

Nur Firman, 2018. UIN Alauddin Makassar, “Peran Advokat dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kota Makassar (DPC Peradi)”.Dalam penelitiannya Nur Firman, terfokus pada sikap dari seorang advokat dalam memberikan

pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu di kota Makassar. Karena menurutnya kasus pendampingan hukum terhadap masyarakat tidak mampu sangat jarang didampingi oleh advokat selepas dari kasus prodeo.



BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI Kota Bandar Lampung)

Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia adalah organisasi yang merupakan wadah berhimpun bagi para advokat yang berlatar sarjana syariah dan sarjana hukum yang meminati praktik hukum dan syariah di Indonesia.¹¹⁴ APSI Kota Bandar Lampung berdiri pada Februari 2016. APSI Kota Bandar Lampung terletak di Jl. Way Sekampung Gg. Pusri II No. 2, Rt.019/LK.II Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, yang didalamnya terdiri atas dewan penasehat, dewan pembina, dewan pengurus, bidang pendidikan dan pengembangan profesi, bidang hubungan antar lembaga, bidang advokasi dan HAM, bidang penelitian dan pengembangan hukum.¹¹⁵

1. Latar Belakang Lahirnya APSI Kota Bandar Lampung

APSI Bandar Lampung terbentuk dari suatu keprihatinan, dimana kurangnya minat dari lulusan fakultas syariah untuk menjadi Advokat. Berangkat dari suatu keprihatinan tersebut, maka didirikanlah APSI Bandar Lampung ini sebagai wadah berkumpulnya terkhusus alumni

¹¹⁴Profil Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)” (On-line), tersedia di <http://apsi.web.id/profil-asosiasi-pengacara-syariah-indonesia-apsi/> (09 April 2019).

¹¹⁵SK DPP APSI Nomor: 02/SK/DPP-APSI/2018.

syariah untuk mengembangkan keilmuannya dengan salah satu cara menjadi advokat.¹¹⁶

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Pusat (DPP) APSI struktur APSI Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Dewan Penasehat

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag.
2. Prof. Dr. H. Idzan Fautanu, M.A.
3. Dr. H. Syarifudin Basyar, M.A.
4. Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.
5. H. Fajrun Najah Ahmad, S.H.

Dewan Pembina

1. Dr. Alamsyah., S.Ag., M.Ag.
2. Dr. Ery Setyanegara, SE., S.H., M.H.
3. Yuhadi, S.H.I.
4. Dra. Eva Rodiah Nur, M.H.
5. Faisal Chudori, S.H., M.H.
6. Ridwansyah, S.E., M. E.Sy.

Dewan Pengurus

Ketua : Hermawan, S.H. I., M.H., CM. SHEL.

Wakil Ketua I : Septawandra Makhfir, S.Ag.

¹¹⁶Hermawan, wawancara dengan penulis, Kantor APSI Lampung, Lampung, 2 Mei 2019.

Wakil Ketua II : Fedhli Faisal, S.H., M.H.

Sekretaris : Fitra Zuli Taufan Jasa, S.Sy., M.H.

Wakil Sekretaris I : Abdul Aziz Subhan SR, S.H.I

Wakil Sekretaris II : M. Edy Bisri Mustofa, S.H.I

Bendahara : Siska, S.H.

Wakil Bendahara : Eka Puspita Sari, S.H.I.

Bidang-Bidang :

1. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Profesi

Ketua : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : Imam Ma'rif, S.H.I.

a. Departemen Sertifikasi

Ketua : Beni Kresna Murti Putra, S.H.

Anggota : Idrus, S.H.

b. Departemen Organisasi

Ketua : Edison Arifin, S.H.

Anggota : Galih Wulandari, S.H., M.H

2. Bidang Hubungan Antar Lembaga

Ketua : Endy Mardeny, S.H., M.H.

Sekretaris : Saiful Anwar, S.H.I.

a. Departemen Hubungan Lembaga

Ketua : Yoni Nasution, S.H.I

Anggota : Sriyanto, S.Sy.

Fitra Liana Suri, S.H.I.

b. Departemen Hubungan Lembaga Internasional

Ketua : Darmawansyah, S.H.I

Anggota : Yosef Arnold, S.H.

3. Bidang Advokasi dan Ham

Ketua : Satria Muda Sepulau Raya, S.H.

Sekretaris : Eri Apriadi, S.H.

a. Departemen Advokasi dan Ham

Ketua : Mariyon, S.H.

Anggota : Resyi Saputra, S.H.

b. Departemen Advokasi Perempuan Dana Anak

Ketua : Panca Agus Prayugo, S.H.

Anggota : Kinanti Suryani, S.H.

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan Hukum

Ketua : M. Ridho Erfansyah, S.H., M.H.

Sekretaris : Tekad Utami, S.Ag.

a. Departemen Riset

Ketua : M. Nahroni, S.H.I

Anggota : Putri Maya R., S.H.

Anggota : Indri Wuryandari, S.H.

b. Departemen Kajian Hukum

Ketua : Sumarasih, S.H.

Anggota : Dedi Saputra, S.H.I.

Anggota : Topan Aquardi, S.H.

3. Program Kerja APSI Kota Bandar Lampung

- a. Pelatihan dan Pendidikan Profesi Advokat;
- b. Mengisi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), pada Pengadilan Agama;
- c. Praktek Peradilan Semu (PPS) pada Fakultas Syariah atas MOU APSI dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung dan pembinaan terhadap mahasiswa;¹¹⁷
- d. Membimbing Mahasiswa PPL/PKL dan Magang calon Advokat;
- e. Mengadvokasi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum melalui Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum (PUSMEDBAKUM) APSI melalui pendampingan bagi masyarakat pedagang yang digusur atas haknya;¹¹⁸
- f. DIKLAT bagi paralegal;
- g. Diskusi mingguan dalam kajian hukum yang terus berkembang di kantor DPW APSI Lampung.¹¹⁹

B. Fungsi dan Peran APSI Kota Bandar Lampung

Peran dan fungsi advokat dapat diketahui bahwa, advokat adalah sebagai pemberi bantuan hukum yang dilakukan di pengadilan dan diluar pengadilan, mencakup seluruh masalah hukum publik maupun hukum

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸Satria Muda Sepulau Raya, wawancara dengan penulis, Kantor APSI Lampung, Lampung, 6 Mei 2019.

¹¹⁹Sumarasih,wawancara dengan penulis, Kantor APSI Lampung, Lampung, 1Mei 2019.

privat.¹²⁰ Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan. Dalam kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan sebagai wadah profesi Advokat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat, yaitu yang berbunyi *“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”* Oleh karena itu, APSI Bandar Lampung yaitu pada dasarnya merupakan organ negara dalam arti luas yang mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara.

Adapun fungsi dan peran APSI¹²¹ adalah sebagai wadah berkumpulnya para advokat berlatar sarjana hukum syariah dan hukum umum. Selain itu APSI juga berperan melakukan pembinaan dan pendidikan advokat dan calon advokat khususnya diprovinsi Lampung dan Indonesia umumnya.

Salah satu wujud dari peran APSI Kota Bandar Lampung yang telah dilakukan adalah melalui sosialisasi kepada mahasiswa fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung dengan memperdalam materi seputar perkara yang dipersengketakan di tempat yang kelak akan mereka tempati tersebut, pemberian materi terkait hal itu akan berdampak terhadap sumber daya

¹²⁰ Ahmad Burhanuddin, wawancara dengan penulis, Kantor APSI Lampung, Lampung, 1 Mei 2019.

¹²¹ Hermawan, wawancara dengan penulis, Kantor APSI Lampung, Lampung, 2 Mei 2019.

manusia yang akan mengisi lembaga peradilan sesuai kapasitas lulusan sarjana sayraih sehingga kualitas bantuan hukum yang diberikan memang bisa dirasakan para pihak yang mengakses keberadaan advokat-advokat APSI Kota Bandar Lampung.¹²²

C. Pelaksanaan Pemberikan Bantuan Hukum oleh Advokat APSI Kota Bandar Lampung bagi Masyarakat

Layanan bantuan hukum merupakan kewajiban advokat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang advokat jo. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Tatacara pemberian bantuan hukum cuma-cuma.

Pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri akan terasa apabila anggota masyarakat masuk kedalam suatu rangkaian proses hukum yang dimana mereka berhak mendapatkan pembelaan dari advokat untuk mendapatkan jaminan tercapainya hukum yang adil dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak individu oleh Negara ketika ia berhadapan dengan instrumen-instrumen Negara. Oleh karena itu perlu adanya jaminan untuk Negara untuk warga negaranya agar bisa mendapatkan bantuan hukum, yang salah satunya diberikan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan hukum dari advokat dalam proses hukum, akan tetap jauh lebih dari itu yaitu menjadikan

¹²²DPW APSI Lampung Adakan Seminar Advokat dan Hukum Islam” (On-line), tersedia di: <http://syariah.radenintan.ac.id/dpw-apsi-lampung-adakan-seminar-advokat-dan-hukum-islam/> (9 Oktober 2019)

masyarakat mengerti akan hukum serta dapat mengkritisi produk-produk hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwasannya penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidaklah bersifat diskriminatif. Artinya setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, baik yang mampu ataupun yang tidak mampu secara sosial-ekonomi sekalipun.

Dengan demikian bantuan hukum hadir untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang tidak mampu. Melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara bantuan hukum harus dapat memberikan keadilan dalam bidang hukum kepada masyarakat tidak mampu saat bermasalah dengan hukum.

Menurut ibu Siska, menyatakan bahwa :

“jika berbicara mengenai peran dari advokat APSI sendiri cukup besar, posisi latar belakang pendidikan Islam jika dibandingkan dengan advokat umum yang secara formal berlatar belakang umum. Kita (advokat APSI Kota Bandar Lampung) pasti memberikan layanan bantuan hukum untuk mereka. Karna dalam Islam sangat dianjurkan untuk saling menolong sesama umat manusia.”¹²³

Bapak Beni Kresna Murti Putra, menambahkan bahwa:

”advokat-advokat APSI Kota Bandar Lampung selalu mengedepankan nilai-nilai islami terlebih dahulu dalam menangani kasus. Seperti contohnya pada saat mediasi. Agar kasus tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan (non litigasi) tanpa harus sampai dibawa ke meja hijau (litigasi).”¹²⁴

¹²³Siska, wawancara dengan penulis, Kantor APSI Lampung, Lampung, 5 Mei 2019.

¹²⁴Beni Kresna Murti Putra, wawancara dengan penulis, Kantor APSI Lampung, Lampung, 2 Mei 2019.

Dengan itu APSI Kota Bandar Lampung dengan nilai islamnya harus berjuang untuk mengubah pandangan miring masyarakat terhadap advokat yang terus-menerus menganggap advokat mempunyai jargon “*membela yang bayar*” harus selalu disanggah. Untuk itu diharapkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana ataupun perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, akan tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan sikap kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (secara hukum) masyarakat yang tidak mampu.

Dalam hal ini APSI Kota Bandar Lampung tidak hanya memberikan bantuan hukum berupa pembuatan surat-surat yang dibutuhkan oleh klien, APSI Kota Bandar Lampung telah menangani kasusnya secara langsung hingga pengadilan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Septawandra Makhfir selaku direktur Pusat mediasi dan bantuan hukum (Pusmedbakum) APSI Kota Bandar Lampung, beliau mengatakan :

“Dari Pusmedbakum APSI tidak hanya melayani atau memberikan bantuan hukum dalam pembuatan surat-surat saja. Tapi kita juga terjun langsung untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Perkara yang kita tangani itu cukup banyak, untuk rata-rata pertahunnya kita 1000-1300 perkara (jumlah dari yang litigasi dan non litigasi).”¹²⁵

Dari pernyataan tersebut, adapun contoh-contoh kasus pemberian bantuan hukum yang pernah dilakukan oleh Pusmedbakum APSI Lampung adalah sebagai berikut:

¹²⁵Septawandra Makhfir, wawancara dengan penulis, Kantor APSI Lampung, Lampung, 2 Mei 2019.

Tabel 1 Contoh Pemberian Bantuan Hukum (Litigasi)

No.	Nama Klien	Jenis Perkara	Ket.
1.	Herwin Saputra Bin Gustam.	Perkara Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.Reg.Perkara : PDM-808/TJKR/12/2016	Telah Terselesaikan
2.	Yuningsih Binti Dede melawan Haryono Bin Warid.	Perkara Perdata Pemberian Nafkah di Pengadilan Agama Kalianda No. 0 217/Pdt.E/2016/PA.Kia	Telah Terselesaikan
3.	Nurza Jaya sebiay Binti Holdin Sebiay melawan Haris Forta Negara Bin Halrudin	Gugatan cerai di Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 1056/Pdt.G/2017PA. Tnk tanggal 20 September 2017	Telah Terselesaikan
4.	Junardi Zazmika Bin Aijin Aidi melawan Erfina Binti Nu'i Efendi	Cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 0140/Pdt.G/2018/PA.Tnk tanggal 22 Januari 2018	Telah Terselesaikan
5.	Helmi Arsyad. Sos Bin Arsyad melawan Emmy Kosasih Binti Atmowirejo	Cerai Talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 1044/Pdt.G/2017/PA.Tnk tanggal 15 Februari 2018	Telah Terselesaikan
6.	Mail bin Maddean	Perkara Pidana Penggelapan Uang di Pengadilan Tanjung Karang No. 890/Pid.Sus/2019/PN Tjk tanggal 30 juni 2019	Sedang Berjalan
7.	Reni Ramayanti Situngkir Binti A.Situngkir melawan Lukman Arifin Bin Jailani	Cerai Talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 0278/Pdt.G/2019/PA.Tnk tanggal 26 Maret 2019	Sedang Berjalan
8.	Emir Nasrullah, IR. Rachmat Fitriansyah, Rudy Adhary, Ade Meccanova. AK, Ansori B melawan Subardan	Objek Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 148/Pdt.Bth/2019/PN Tjk tanggal 28 Juni 2019	Sedang berjalan
9.	Sumari Binti	Penguasaan Anak di	Sedang

	Sarijan melawan Sugeng Widodo Bin Diman	Pengadilan Agama Kalianda No. 0946/Pdt.G/2019/PA.Kla tanggal 29 Juni 2019	Berjalan
10.	Juhri Bin Johan	Pencurian di Pengadilan Negeri Kalianda No. 246/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 20 Juni 2019	Telah Terselesaikan

Sumber : Data dikelola kantor APSI Lampung

Dari tabel 1 (satu) diatas, sebagai contoh dipilih satu kasus untuk dideskripsikan pelaksanaan pemberian bantuan hukumnya. Alasan dipilih satu kasus karena suatu keterbatasan izin untuk melihat salinan putusan perkara. Kasus yang dipilih adalah kasus cerai talak yang diambil dari tabel 1 nomor 5 yang akan diuraikan pelaksanaan bantuan hukumnya sebagai berikut:

Kasus cerai talak yang disebutkan pada tabel 1 nomor 5, dilakukan mediasi terhadap dua belah pihak, agar pemohon dan termohon rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka. Mediasi tersebut didampingi oleh mediator Dra.Hj. Maimunah A. Rahmah, S.H., M.HI. Hakim Pengadilan Agama Tanjung karang sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Akan tetapi, mediasi tersebut tetap tidak berhasil. Karena perdamaian tidak berhasil maka pada sidang tanggal 09 November 2017 dibacakannya surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Dengan banyak pertimbangan-pertimbangan dan rekonvensi yang diajukan oleh pemohon dan termohon, Pengadilan Agama Tanjung Karang mengabulkan permohonan pemohon yaitu untuk melakukan cerai talak

kepada termohon dengan Reg. No. : 1044 /Pdt. G/ 2017/ P.A Tnk tanggal 15 Februari 2018.

Advokat APSI Kota Bandar Lampung dalam memberikan bantuan hukum di Pengadilan Agama Tanjung Karang dianggap positif bagi pencari kebenaran dan penegakan keadilan khususnya dalam perkara perceraian.¹²⁶ Peran positif tersebut meliputi:

1. Perkara yang dihadapi menjadi lebih ringan
2. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi
3. Mewakili pihak-pihak jika berhalangan hadir
4. Mendampingi para pihak dalam persidangan sehingga rasa takut dan malu dapat berkurang.

Dalam penggunaan jasa advokat ini, advokat memberikan pelayanan bantuan hukum mulai dari proses administrasi hingga pendaftaran pengajuan gugatan pihak Penggugat didampingi oleh advokat. Kemudian di dalam persidangan mereka hanya mengikuti satu kali saja saat persidangan pendahuluan. Setelah itu mereka tidak mengikutinya kembali, karena proses selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada pengacaranya sampai dengan selesai dan terjadi putusan oleh pihak pengadilan. Mereka datang kembali untuk mendengarkan langsung dan terkadang hanya menerima surat putusannya saja.¹²⁷ Dalam proses ini dapat dikatakan

¹²⁶Nurza Jaya, wawancara dengan penulis, di kediaman klien, Bandar Lampung 26 September 2019.

¹²⁷Helmi Arsyad, wawancara dengan penulis, di kediaman klien, Bandar Lampung, 28 September 2019.

selama persidangan yang banyak terlihat justru antara pihak advokat dengan advokat bersama hakim di pengadilan.

Hal ini diperkuat dengan pendapat dari ibu Nurza Jaya ia merasa tenang apabila didampingi oleh advokat pada saat persidangan. Masalah yang sedang dihadapi menjadi tidak begitu sulit, karena advokat yang mendampinginya selalu memberikan pemahaman hukum tentang perkara yang sedang dihadapinya dan juga ia selalu diberi nasehat-nasehat.¹²⁸ Begitu pula dengan bapak Jornadi Zazmika yang berpendapat bahwa menggunakan jasa advokat dapat meringankan beban yang dihadapinya, karena jika ia tidak dapat menghadiri persidangan maka dapat diwakilkan oleh advokat yang mendampinginya.¹²⁹

Tabel 2 Contoh Pemberian Bantuan Hukum (Non Litigasi)

No.	Nama Perkara	Tanggal Penindakan	Tanggal Kuasa
1	Suryadi	Kamis, 7 Maret 2019	Selasa, 26 Februari 2019
2	Imam Akbar	Jum'at, 30 Mei 2019 untuk pertemuan pada selasa, 11 Juni 2019	Sabtu, 27 April 2019
3	Nazaruddin	Jum'at, 10 Mei 2019	Kamis, 2 Mei 2019
4	Wasid	Kamis, 13 Juni 2019 di Kantor ABDA	Selasa, 7 Mei 2019
5	Febry Riansyah	Rabu, 29 Mei 2019	Jum'at, 24 Mei 2019
6	Dian Imelda Lisanti	Senin, 20 Mei 2019	Kamis, 16 Mei 2019
7	Eliana Mulyadi	Senin, 27 Mei 2019	Senin, 27 Mei 2019

¹²⁸Nurza Jaya, wawancara dengan penulis, di Kediaman klien, Bandar Lampung, 26 September 2019.

¹²⁹Jornadi Zazmika, wawancara dengan penulis, di Kediaman klien, Bandar Lampung 26 September 2019.

8	Suwardi Andika	Jum'at, 7 Juni 2019	Senin, 3 Juni 2019
9	Yansori	Selasa, 25 Juni 2019	Kamis, 20 Juni 2019

Sumber: Data dikelola Kantor APSI Lampung

Adapun prosedur agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum tersebut terdapat beberapa tahapan, yaitu :

Bagan 1. Prosedur Perolehan Bantuan Hukum



Keterangan:

1. Datang kekantor APSI Kota Bandar Lampung untuk meneminta bantuan hukum kepada advokat APSI Kota Bandar Lampung;¹³⁰
2. Untuk mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;¹³¹

¹³⁰ Abdul Aziz Subhan SR, wawancara dengan penulis, Kantor APSI Lampung, Lampung, 10 Mei 2019.

¹³¹ Fitra Zuli Taufan Jasa, wawancara dengan penulis, Kantor APSI Lampung, Lampung, 11 Mei 2019.

3. Melampirkan Surat Keterangan Miskin (SKM) dari Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum;¹³²
4. Selanjutnya, advokat APSIKota BandarLampung menjalankan tugasnya.

Bapak Fitra Zuli Taufan Jasa, selaku sekretaris APSI Lampung mengatakan bahwa:

“untuk menentukan siapa penerima bantuan hukum tersebut haruslah selektif. Harus benar-benar kita survei, agar jasa hukum kita tidak salah digunakan.”¹³³

Jadi dapat dikatakan dari pernyataan tersebut bahwasannya APSI Lampung ini menjunjung tinggiasas *equality before the law*, terutama untuk masyarakat yang tingkat ekonominya menengah kebawah serta pemahaman hukumnya sangat minim. Menurut beliau pun masyarakat yang meminta bantuan hukum kepada pihak APSI Lampung untuk membuat member agar bisa dengan lebih mudah untuk menggunakan jasa advokat yang secara *prodeo*.

Mengenai dana dalam pemberian bantuan hukum APSI Kota Bandar Lampung memperoleh dana dari pemerintah, karena sudah jelas bahwa negara telah menyediakan dana bagi advokat yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Ketentuan tersebut terdapat pada Undang-

¹³²M. Edy Basri Mustofa, wawancara dengan penulis, Kantor APSI Kota Bandar Lampung, Lampung, 12 Mei 2019.

¹³³Fitra Zuli Taufan Jasa, wawancara dengan penulis, Kantor APSI Kota Bandar Lampung, Lampung, 11 Mei 2019.

Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.¹³⁴ Selain dana yang diberikan oleh pemerintah APSI Kota Bandar Lampung juga melakukan subsidi ulang untuk menutupi dana penerima bantuan hukum secara *prodeo*, maka diambil dari pengguna jasa hukum yang dikenakan *fee*.¹³⁵

D. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Oleh Advokat APSI Kota Bandar Lampung

Secara umum untuk mengakses dan mendapatkan keadilan bagi masyarakat kurang mampu masihlah sulit. Penyebabnya antara lain yaitu masih adanya sisi negatif dalam penegakan hukum yang masih menghantui masyarakat kurang mampu ini. Keraguan masyarakat untuk datang ke Pos bantuan hukum juga dikarenakan pandangan masyarakat terhadap advokat yang seolah-olah tidak mau memberikan bantuan hukum apabila tidak dibayar ataupun mahal nya jasa mereka dalam memberikan bantuan hukum. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan proses bantuan hukum itu sendiri yang diberikan oleh advokat menjadi salah satu kendala dalam proses pemberian bantuan hukum itu sendiri. Masyarakat juga telah merasa mampu menyelesaikan segala proses hukum yang harus dijalani dan menangani pekaranya sendiri. Itulah yang membuat mereka memilih untuk maju sendiri menghadapi serangkaian proses hukum.

Sebenarnya dari pihak penyidik telah menyampaikan hak terdakwa agar didampingi penasehat hukum baik yang menyediakan sendiri maupun

¹³⁴Fedhli Faisal, wawancara dengan penulis, Kantor APSI Kota Bandar Lampung, Lampung, 16 Mei 2019.

¹³⁵Fitra Zuli Taufan Jasa, wawancara dengan penulis, Kantor APSI Kota Bandar Lampung, Lampung, 11 Mei 2019.

disediakan oleh penyidik sesuai yang telah diamanatkan oleh KUHP bahwa guna kepentingan seseorang berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan apabila ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, akan tetapi pada kenyataannya baik masyarakat itu sendiri justru telah merasa mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri juga penyidik beranggapan bahwa tidak perlu adanya penasehat hukum, karena hadirnya advokat justru dapat menghambat dan memperumit jalanya proses penyidikan hingga ke pengadilan. Padahal sebenarnya fungsi dari advokat itu sendiri sangatlah penting dalam mendampingi terdakwa dalam menjalankan tiap proses hukum yang sedang dilalui. Apabila tersangka telah setuju untuk menghadapi masalahnya sendiri, maka penyidik akan membuatkan berita acara penolakan didampingi penasehat hukum untuk melampirkan dan ditandatangani tersangka atau terdakwa yang bersangkutan.

Hambatan selanjutnya yang dimiliki oleh advokat APSI Kota Bandar Lampung dalam memberikan bantuan hukum menurut bapak Septawandra Makhfir yaitu keilmuan dari para advokat-advokat APSI Kota Bandar Lampung itu sendiri.¹³⁶ Maksudnya adalah penguasaan materi ilmu yang dimiliki oleh para advokat APSI Kota Bandar Lampung masih perlu adanya pengkajian ilmu lebih dalam lagi. Akan tetapi menurut bapak Fitra Taufan Jasa mengenai keilmuan dari advokat-advokat APSI Kota Bandar Lampung memiliki tingkat keilmuan yang sama, hanya yang

¹³⁶Septawandra Makhfir, wawancara dengan penulis, Kantor APSI Kota Bandar Lampung, Lampung, 2 Mei 2019.

membedakannya adalah strategi dari advokat-advokat dalam menyelesaikan suatu perkara.¹³⁷

Upaya yang dilakukan oleh APSI Kota Bandar Lampung terhadap para advokatnya yaitu dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sedini mungkin untuk mempersiapkan advokat yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Advokat juga harus mempunyai program dalam peningkatan mentalitas dan strategi dalam penanganan suatu perkara. Apabila mentalitas dan strategi advokat baik, maka tidak akan berdampak pada pelanggaran kode etik yang ada. Jadi sikap profesionalisme seorang advokat sangatlah penting untuk penegakan hukum kedepannya. Peningkatan SDM advokat sebagai profesi yang terhormat yang artinya anggota APSI Kota Bandar Lampung juga memiliki kompetensi dan daya saing tinggi, sehingga disegani oleh penegak hukum yang lain. Ini juga sebenarnya membangun hubungan baik dengan penegak hukum yang lain.

Upaya yang tidak kalah penting yaitu untuk penegakan hukum oleh advokat yang dilakukan secara terus menerus yaitu sosialisasi sebagai bentuk upaya preventif melalui media cetak maupun elektronik, melalui LSM dan para tokoh masyarakat, serta secara berkala memberikan materi penyuluhan hukum dan lain sebagainya.

¹³⁷Fitra Zuli Taufan Jasa, wawancara dengan penulis, Kantor APSI Kota Bandar Lampung, Lampung, 11 Mei 2019.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat (APSI Kota Bandar Lampung)

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh penulis, peran advokat APSI Kota Bandar Lampung dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Advokat APSI Kota Bandar Lampung dalam menjalankan perannya melalui Pusat mediasi dan bantuan hukum(Pusmedbakum) APSIKota Bandar Lampung sebagai penyalur pelayanan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.Selayaknya seperti tugas/peran pokok dari advokat itu sendiri, advokat-advokat APSIKota Bandar Lampung dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.Seperti pendampingan hukum untuk klien mulai dari nonlitigasi (luar pengadilan) sampai dengan litigasi (dalam pengadilan).

Selama ini terdapat kesan pro dan kontra dimasyarakat terhadap peran seorang advokat. Maka dari itu advokat APSI Kota Bandar Lampung dalam menjalankan profesinya baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri baik untuk mendampingi ataupun menjadi kuasa atas nama kliennya harus mengikuti hukum acara yang berlaku, agar mendapatkan simpatik dari masyarakat. Dengan mengikuti peraturan yang ada, akan dapat

meminimalisir praktek yang menyimpang dan dapat dipertanggungjawabkan prosedurnya.

Peran advokat APSI Kota Bandar Lampung juga dapat dilihat melalui kerjasama yang telah dilakukan oleh APSI Kota Bandar Lampung dengan Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Pengadilan Agama Kalianda yang dibuktikan dengan akta notaris/surat perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka akan lebih maksimal lagi untuk para advokat APSI Kota Bandar Lampung dalam melayani dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Agar seluruh masyarakat mendapatkan atas haknya, terutama hak persamaan dihadapan hukum.

Advokat APSI Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai advokat dalam memberikan bantuan hukum benar-benar selektif dalam menentukan siapa yang bisa mendapatkan bantuan hukum, karena mereka tidak ingin jasa bantuan hukum yang mereka berikan disalah gunakan, serta agar asas *equality before the law* (persamaan dihadapan hukum) benar-benar terealisasi dan agar tidak ada diskriminasi hak-hak kembali. Terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah, karena mereka tidak mampu untuk menyewa advokat/pengacara. APSI Lampung sendiri telah mempermudah masyarakat untuk dapat mengakses bantuan hukum tersebut dengan berbagai macam cara, yaitu salah satunya dengan membuat member. Dari member tersebut akan mudah mengadakan masalah atau perkara yang tengah dihadapi.

Peran advokat APSI Kota Bandar Lampung dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dianggap positif bagi pencari kebenaran dan keadilan. Peran positif itu dapat digambarkan dalam beberapa hal, yaitu:

1. Perkara yang dihadapi menjadi lebih ringan
2. Memberikan bantuan hukum yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi
3. Mewakili pihak jika berhalangan hadir
4. Mendampingi pihak yang berperkara dipengadilan
5. Dalam memberikan bantuan hukum, sebagai advokat profesional, tetap menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Keuntungan dari penggunaan jasa advokat, yang dimulai dengan proses administrasi sampai dengan pengajuan gugatan/permohonan. Di dalam persidangan para pengguna jasa advokat APSI Kota Bandar Lampung ini dapat mengikuti satu kali saja saat persidangan pertama, setelah itu mereka dapat tidak mengikuti lagi, karena proses persidangan selanjutnya telah diserahkan kepada advokat yang mendampingi. Ada juga karena kesibukan para pengguna jasa advokat ini hanya datang diawal dan diakhir persidangan untuk mendengarkan langsung putusan dari majelis hakim.

Advokat APSI Kota Bandar Lampung sebagai advokat yang berlatarbelakang sarjana hukum syariah, maka advokat APSI Lampung sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam dalam mengadvokasi kliennya. Meskipun begitu advokat APSI Lampung tidak meninggalkan

hukum positif yang berlaku dinegara Indonesia.Karena Indonesia merupakan negara hukum sepertiyang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Negara hukum, bantuan hukum merupakan pijakan awal untuk memperkuat masyarakat miskin dan marginal supaya dapat mengakses hak-hak dasar lainnya. Mengenai proses hukum yang dilakukan di pengadilan, jaminan atas hak bantuan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan salah satu cita-cita Negara yaitu warga negaranya mampu memperoleh pengadilan yang adil dan mengakses keadilan.

Negara juga tidak hanya memperhatikan masyarakat miskin dan marginal saja.Tetapi Negara menjamin hak-hak semua warga negaranya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara sama dihadapan hukum. Disini terlihat bahwa Negara hadir untuk semua warga negaranya tanpa terkecuali.

Selain itu peran advokat tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada campur tangan negarasebagai wadah dan fasilitator untuk menerapkan salah satu tugas advokat yaitu memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan tanggung jawab suatu Negara yang menghendaki persamaan dimuka hukum dan pemerintahan bagi warga negaranya.Terlebih Negara Indonesia yang memiliki warga Negara dengan tingkat pendidikan, sosial, dan ekonomi yang tidak merata yang berakibat pada kemampuan mereka mengakses keadilan.Hanya saja selama ini tanggung jawab Negara untuk

memenuhi hak atas bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan marginal yang dilakukan oleh advokat publik yang telah bergabung dalam organisasi bantuan hukum maupun oleh para advokat yang menjalankan fungsi *prodeo publico*.

Oleh karena itu dalam menjalankann profesinya, advokat APSI Kota Bandar Lampung haruslah berusaha untuk menampik anggapan-anggapan negatif dari masyarakat mengenai peran dari profesinya tersebut. Agar masyarakat benar-benar merasakan bahwasannya Negara benar-benar hadir dan memperlakukan masyarakatnya dengan adil seperti yang telah tercatat dalam undang-undang.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat(APSI Lampung)

Dalam Islam advokat dikenal dengan lembaga pemberi bantuan hukum. Secara fungsinya, ahli hukum menyamakan posisi advokat dengan lembaga pemberibantuan hukum yaitu *hakam*, *mufti*, dan *mushalih-alaih*. Ketiga pemberi bantuan hukum tersebut secara fungsi hampir sama dengan advokat yaitu lembaga penegak hukum diluar pemerintah yang memiliki tugas sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat.

Bantuan hukum dalam Islam pun tidaklah sesederhana pemahaman bantuan hukum dalam konsep barat seperti jasa hukum secara cuma-cuma (*prodeo*), tetapi konsep bantuan hukum dalam Islam sesungguhnya memiliki pemaknaan yang lebih luas yakni menjadi seseorang yang berfungsi pemutus hukum dan perantara perdamaian dikalangan dua belah pihak yang berselisih serta memiliki tugas penegak hukum dan keadilan. Oleh sebab itu,

kedudukan advokat dalam hukum tidak hanya terikat dengan syarat-syarat tertentu yang memenuhi kriteria penegak hukum, tetapi juga memiliki tugas dan fungsi yang mulai dimata hukum.

Jika dalam hukum positif mengenal asas *equality before the law* (persamaan dihadapan hukum), dalam islam pun mengenal teori persamaan hak hukum manusia yang didasarkan pada teori kehormatan manusia (*Al-Fitrah*). Secara alami dan hakiki (*fitrah*) setiap manusia memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh Al-Maududi dalam *Human Right In Islam* bahwa “secara fitrah setiap orang lahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat”.

Sebagaimana dalam prinsip-prinsip penegakan hukum dalam Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad. Sebagaimana dalam firman Allah Surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Maidah ayat 42:

a. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya: dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosan dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2)¹³⁸

¹³⁸DepagRI, *al-Qur'an dan Terjemah*...., h. 106.

b. Al-Maidah ayat 42

وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا^ط وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ^ع إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المائدة: ٤٢)

Artinya: *dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.* (Q.S. al-Maidah : 42)¹³⁹

Dari ayat diatas diketahui bahwa terdapat kewajiban untuk saling tolong menolong dan menegakan keadilan. Selayaknya advokat yang merupakan seseorang yang mewakili suatu perkara, haruslah mampu memperjuangkan keadilan orang yang diwakilinya.

Ulama fiqh pun berpendapat bahwa *aqad al wakalah* (pemeliharaan atau pendelegasian) diboleh dalam Islam. Seperti pendapat Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan umat dirinya.

Dalil lain sebagai landasan pemberian jasa bantuan hukum adalah perbuatan sahabat yang berwakil dalam suatu perkara yang dihadapi. Dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa `Aqil pernah berwakil dalam suatu perkara pada masa khalifah Abu Bakar r.a, hal yang sama juga dilakukan oleh Abdullah bin Jakfar pada masa Usman Ibn Affan.

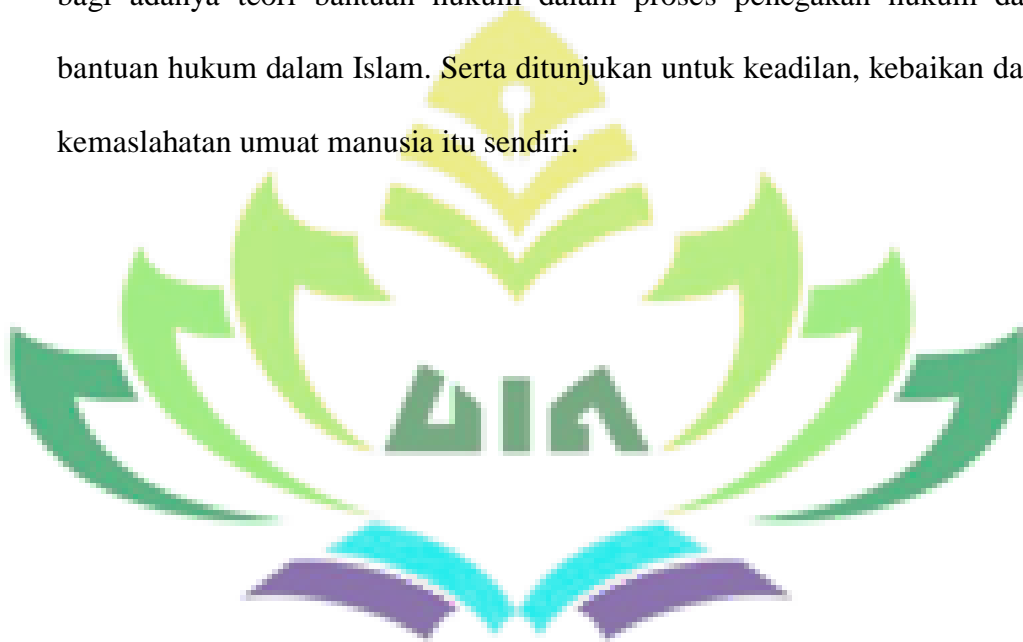
Menurut ulama fiqh mengenai perwakilan atau pemberian kuasa yang diberikan kepada orang lain, sah perbuatan hukumnya selama yang

¹³⁹ *Ibid*, h. 116.

diberikan kuasa atau orang yang akan mewakilinya sudah cakap untuk mewakilkan urusan orang lain kepadanya. Dimana para ulama juga memberikan pengertian mengenai perwakilan atau pemberian kuasa kepada orang lain menurut ulama Syafi'iyah "*suatu ibarat seorang menyerahkan suatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya*", menurut Hanabilah al-wakalah ialah permintaan "*ganti seorang yang membolehkan tasharruf yang seimbang pada pihak yang lain, yang didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.*", dan wakalah ini dapat dipahami bahwa merupakan penyerahan dari seorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan selama yang mewakilinya masih hidup.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadist, perbuatan sahabat, dan pendapat para ulama diatas, bahwa perbuatan berwakil dalam suatu perkara sudah dilaksanakan sejak masa Islam karena telah menjadi kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, para ulama fiqh membolehkan berwakil di dalam segala hal, termasuk perwakilan dengan menunjuk pengacara, advokat, kuasa hukum atau penasehat hukum. Wakil atau perwakilan sendiri dalam Islam dikenal dengan istilah *Al-wakalah fi al-khusumah* (kuasa hukum). Perwakilan yang dimaksud disini adalah perwakilan yang ditemukan dalam perkara atau sengketa di pengadilan. Wakalah sendiri mempunyai sifat yaitu mewakili urusan orang lain, yang identik dengan perwakilan seseorang dalam membantu menyelesaikan suatu perkara, yang ada dalam proses peradilan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa, peran dari advokat APSI Kota Bandar Lampung dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat telah sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan bahwa kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dalam Islam pun telah jelas bahwasannya peran advokat sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Hal ini menjadi dasar bagi adanya teori bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dan bantuan hukum dalam Islam. Serta ditunjukan untuk keadilan, kebaikan dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Advokat APSI Lampung telah berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat/klien yang datang untuk meminta bantuan hukum dalam menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi, seperti memberikan penjelasan tentang hukum, mendampingi klien jika klien tersebut tidak berani ataupun malu untuk datang ke pengadilan serta mewakili klien apabila klien berhalangan hadir dalam persidangan. APSI Kota Bandar Lampung tidak membedakan status sosial-ekonomi masyarakat yang akan menjadi klien mereka. Dalam hal ini APSI Kota Bandar Lampung juga sangat mempermudah masyarakat agar bisa mendapatkan bantuan hukum tersebut, mereka diperkenankan untuk membuat member agar mereka lebih mudah untuk mengadukan permasalahan hukum yang sedang mereka alami. Jadi, masyarakat tidaklah kesulitan untuk memperjuangkan hak-haknya dihadapan hukum.
2. Menurut fiqh siyasah peran advokat APSI Kota Bandar Lampung dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat ini telah sesuai dengan ajaran Islam yaitu membantu seseorang dalam hal kebaikan, dan meringankan beban seseorang yang membutuhkan yaitu para pencari

keadilan yang belum mengerti atau paham tentang hukum. Dalam sejarah Islam sendiri pun telah mengenal pemberian kuasa kepada orang lain. Seperti yang telah dilakukan oleh sahabat Rasulullah, yang mewakilkan suatu perkaranya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran supaya lebih meningkatkan kualitas serta kuantitasnya dalam hal menangani perkara, serta dalam memberikan informasi dan pelayanan hukum. Dan diharapkan juga agar terus berupaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, karena bagaimanapun peran dari penegak hukum sangatlah dibutuhkan untuk terciptanya penegakan hukum yang adil untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Kamus

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Hasan Binjai. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abû ‘AbdAllâh Muhammad ibn Muhammad al-Hâkim. *Al-Mu tadarak ‘alâShahihayn*. (Cet.I, Jilid VI). Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H.
- Bambang Widjoyanto, *Koruptor itu Kafir*. Bandung: Mizan, 2010.
- Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi* Jakarta: PSHK, 2001.
- Bunyana Solihin. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- C.S.T. Kansil. *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Depag RI. *al-Qur’an dan Terjemah*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peneterjemah Penafsiran al-Qur’an, 1971.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Didi Kusnadi. *Bantuan Hukum dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT.Elex Media Gramedia Komputindo, 2000.
- Frans Hendra Winarta. *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Harlen Siaga. *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Hartini, Rahmat Rosyadi dan Sri. *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Ibnu Taimiyah. *Etika Beramar Ma’ruf Nahi Munkar*, terjemahan Abu Fahmi. Jakarta: GemaInsani Press, 1995.

- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- J. Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raia Grafindo, 1997.
- Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafa.*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kuat Puji Prayitno. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2010.
- Mas Achmad Santosa. *Perjalanan Ke Depan Bantuan Hukum dan Access to Justice dalam Bantuan Hukum Indonesia: Akses Masyarakat Marjial Terhadap Keadilan*. Jakarta: LBH Jakarta, 2007.
- Morris Ginsberg. *Keadilan Dalam Masyarakat*. Bantul: Pondok Edukasi, 2003.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Muhammad Faqih Muslim. *Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2009.
- M. Quraish Shihab. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2001.
- Salman Bin Fahd Al-Audah. *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, terjemahan Ummu' 'udhama' azmi. Solo: PustakaMantiq.
- Soejono Soekanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Ghali Indonesia, 2012.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Sugiono. *Metode Penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suhwardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sujarweni V, Wiratna. *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2014.

Suryani, Sartono dan Bhekti. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

V Harlen Sinaga. *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.

Waryono Abdul Ghafur. *Tafsir Sosial*. Yogyakarta: eLSAQ, 2005.

Yudha pandu. *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*. Jakarta: PT. Abadi Jaya, 2001.

B. Undang-Undang

PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

C. Jurnal

Achmad Nur Qodin. 2014. Peranan Asosiasi Pengacara Syaria'ah Indonesia (APSI) dalam upaya penyelamatan Aset Kreditur melalui Fidusa. *Jurnal Penelitian*. 8(2).

Asumni Mth. 2014. Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 12(4).

Erie Hariyanto dan Ni'matunnuriyah. 2017. Advokat Syariah dalam Mediasi Perkara Perceraian. *Ulul Albab*. 18(1).

N, Setyowati, H. & Muchining. 2018. Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *LexScientia Law Review*. 2(2).

Rosdalina. 2015. Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Agama. *Jurnal Politik Profetik*. 6(2).

SetyoLanen. 2018. Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penegak Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*. 1(1).

Soar H. Siburian. 2015. Peranan Advokat Melaksanakan Bantuan Hukum terhadap Klien dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*.4(6).

Syukrawati. 2015. Eksistensi Advokat Menurut Hukum Islam (Peluang Advokat bagi Sarjana Syariah dalam Proses Penegakan Hukum). *Al-Qishthu*. 13(1).

D. Skripsi

Inda Areskha, *Skripsi Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)*, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Nur Firman, *Skripsi Peran Advokat dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kota Makkasar (DPC PERADI)*, Makkasar, Universitas Islam Negeri Alaudin Makkasar, 2018.

Vivin Sariyanti. *Skripsi Peran Advokat Non Muslim dalam Membela Klien Muslim Ditinjau dari Hukum Islam*, Bengkulu :Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2018.

E. Internet

APSI Adakan Seminar Hukum Sekaligus membuka Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (On-line), tersedia di :<http://apsilampung.com/apsi-adakan-seminar-hukum-sekaligus-membuka-pendidikan-dan-pelatihan-profesi-advokat/> (11 Februari 2019)

Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyariyyah) (on-line), tersedia di: <http://pa-purworejo.go.id/web/peradilan-dalam-politik-islam-al-qadhaiyyah-fis-siyasah-assyariyyah/> (9 Juni 2019).

Profesi Pengacara, Mengapa Tidak? (On-line), tersedia di :<https://pengusahamuslim.com/2748-profesi-pengacara-mengapa-1460.html> (18 April 2019).

Profil Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) (On-line), tersedia di <http://apsi.web.id/profil-asosiasi-pengacara-syariah-indonesia-apsi/> (28 November 2018).

Profil Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) (On-line), tersedia di [:http://www.dpwapsijakarta.org/2016/02/profil-asosiasi-pengacara-syariah.html?m=1](http://www.dpwapsijakarta.org/2016/02/profil-asosiasi-pengacara-syariah.html?m=1) (7 Februari 2019).

Profil Singkat APSI (On-line), tersedia di [:http://apsi.web.id/profil-kiprah-anggota-apsi/](http://apsi.web.id/profil-kiprah-anggota-apsi/) (11 Februari 2019)

Profil Singkat APSI (On-line), tersedia di <http://apsi.web.id/profil-kiprah-anggota-apsi/> (06 Oktober 2019).

Riyankachfi. "Sejarah dan Organisasi Advokat di Indonesia". (On-line), tersedia di : <http://isikepalakachfi.wordpress.com/2017/04/28/sejarah-dan-organisasi-advokat-di-Indonesia/> (03 Oktber 2019).

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Ketua APSI Lampung

- a. Apa yang melatarbelakangi lahirnya APSI Lampung?
- b. kapan lahirnya APSI Lampung?
- c. Apa program kerja dari APSI Lampung?
- d. Apa fungsi dan peran dari APSI Lampung?
- e. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat?
- f. Adakah batasan kasus dalam pemberian bantuan hukum?

2. Wawancara Kepada Advokat APSI Lampung

- a. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat?
- b. Bagaimana cara masyarakat mengakses bantuan hukum tersebut?
- c. Apa kendala dalam pemberian bantuan hukum tersebut?
- d. Pemberian bantuan hukum ini dalam kategori litigasi dan non litigasi atau hanya salah satunya saja?
- e. Berapa kasus yang ditangani oleh advokat APSI Lampung dalam pertahunnya?

Lampiran 2

Wawancara

